

BUKU I

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
RKPD
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN



2017

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BAPPEDA LITBANG
TAHUN 2017**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018	ii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	6
1.5. Maksud dan Tujuan	7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	8
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	8
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	8
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	8
B. Potensi Pengembangan Wilayah	14
C. Wilayah Rawan Bencana	19
D. Demografi	19
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	21
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	21
B. Fokus Kesejahteraan Sosial	30
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	36
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	40
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	42
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	217
2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	217
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan	219
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	226
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	226
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	227
1. Kondisi Ekonomi Daerah	227
2. Perkiraan Tahun 2018	233

3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018	233
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	235
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	235
3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	1236
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	239
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	239
4.2.	Prioritas Pembangunan Daerah	247
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	263
BAB VI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	271
BAB VII	PENUTUP	277

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan	8
Tabel 2.2	Luas dan Persentase Hutan Menurut Fungsinya	11
Tabel 2.3	Rekomendasi Tim Terpadu Terhadap Usulan Review Kawasan Hutan Di Kabupaten Bengkulu Selatan	12
Tabel 2.4	Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2030	13
Tabel 2.5	Potensi Bahan Galian Pertambangan Di Kabupaten Bengkulu Selatan	15
Tabel 2.6	Suku Di Kabupaten Bengkulu Selatan	16
Tabel 2.7	Kekayaan Budaya (Tari-Tarian dan Adat Istiadat di Kabupaten Bengkulu Selatan	17
Tabel 2.8	Pemeluk Agama Di Kabupaten Bengkulu Selatan	17
Tabel 2.9	Potensi Wisata Di Kabupaten Bengkulu Selatan	18
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2015	20
Tabel 2.11	PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	21
Tabel 2.12	PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	23
Tabel 2.13	Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015 (Persen)	26
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015 (Ribu)	27
Tabel 2.15	Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2015 (Rupiah Per Kapita Sebulan)	28
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu 2011-2015	28
Tabel 2.17	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu 2010-2014	29
Tabel 2.18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu 2010-2014	29
Tabel 2.19	Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan 2011-2015	30
Tabel 2.20	Jumlah Kelahiran Bayi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2016	33
Tabel 2.21	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan 2011-2015	33
Tabel 2.22	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2010-2016	33
Tabel 2.23	Persentase Balita Kurang Gizi/Gizi Buruk di Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan	34
Tabel 2.24	Penduduk 15 Tahun Keatas berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2011-2015	34
Tabel 2.25	Jumlah Pengangguran Terbuka Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015	35
Tabel 2.26	Data Fokus Pendidikan Tahun 201-2015	36
Tabel 2.27	Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015	37
Tabel 2.28	Jumlah Tenaga Medis Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015	38
Tabel 2.29	Status Jalan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015	38
Tabel 2.30	Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Di Kabupaten Bengkulu Selatan	39

Tabel 2.31	Produksi Perikanan Di Kabupaten Bengkulu Selatan	39
Tabel 2.32	Luas Perkebunan Di Kabupaten Bengkulu Selatan	40
Tabel 2.33	Panjang Jalan Menurut Jenis Pemukaan dan Pemerintahan Yang Berwenang Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015	41
Tabel 2.34	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kelas Jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013-2015 (Km)	42
Tabel 2.35	Angka Kriminalitas Di Kabupaten Bengkulu Selatan	42
Tabel 2.36	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2016 Kabupaten Bengkulu Selatan	45
Tabel 2.37	Identifikasi Permasalahan Pembangunan	219
Tabel 3.1	Peranan Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015 (%)	231
Tabel 3.2	Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015	232
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan 2015-2019	236
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2015-2019	237
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 2015-2019	238
Tabel 4.1	Strategi dan Arah Kebijakan	240
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	253
Tabel 5.1	Rencana Prioritas Pembangunan, Program dan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018	264
Tabel 5.2	Kabutuhan Pendanaan indikatif Berdasarkan OPD	268
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Kabupaten Bengkulu Selatan	273

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD	3
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen	6
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Bengkulu Selatan	9
Gambar 2.2	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan	11
Gambar 2.3	Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan	19
Gambar 2.4	Peta Tematik Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa/Km ²)	20
Gambar 2.5	Angka Kriminalitas	26
Gambar 2.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Pendidikan Tahun 2011-2015	31
Gambar 2.7	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015	32
Gambar 3.1	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	226
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015	227
Gambar 3.3	Peran Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015	230
Gambar 3.4	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015	233



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu

- Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan OPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD; dan
- Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari periodisasi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021. Dengan disusunnya RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi momentum terwujudnya visi dan misi serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga berdampak nyata pada semakin meratanya pembangunan disegala bidang terutama kesehatan, pendidikan dan pertanian sebagai upaya penanggulangan kemiskinan untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018, dilakukan pendekatan pembangunan Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, adapun pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :



1. **Pendekatan politis**, RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan unsur DPRD dalam forum OPD dan Musrenbang;
2. **Pendekatan partisipatif**, yaitu RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam forum OPD dan Musrenbang;
3. **Pendekatan teknokratis**, yaitu penyusunan RKPD berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah dengan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
4. **Pendekatan top-down planning**, yaitu sinergi dan komitmen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan nasional melalui langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan Nasional dan usulan Kebutuhan Dana kepada Kementerian Negara;
5. **Pendekatan bottom-up planning**, yaitu penjangkauan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan identifikasi dan perangkungan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dari tingkat desa maupun kecamatan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan terintegrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

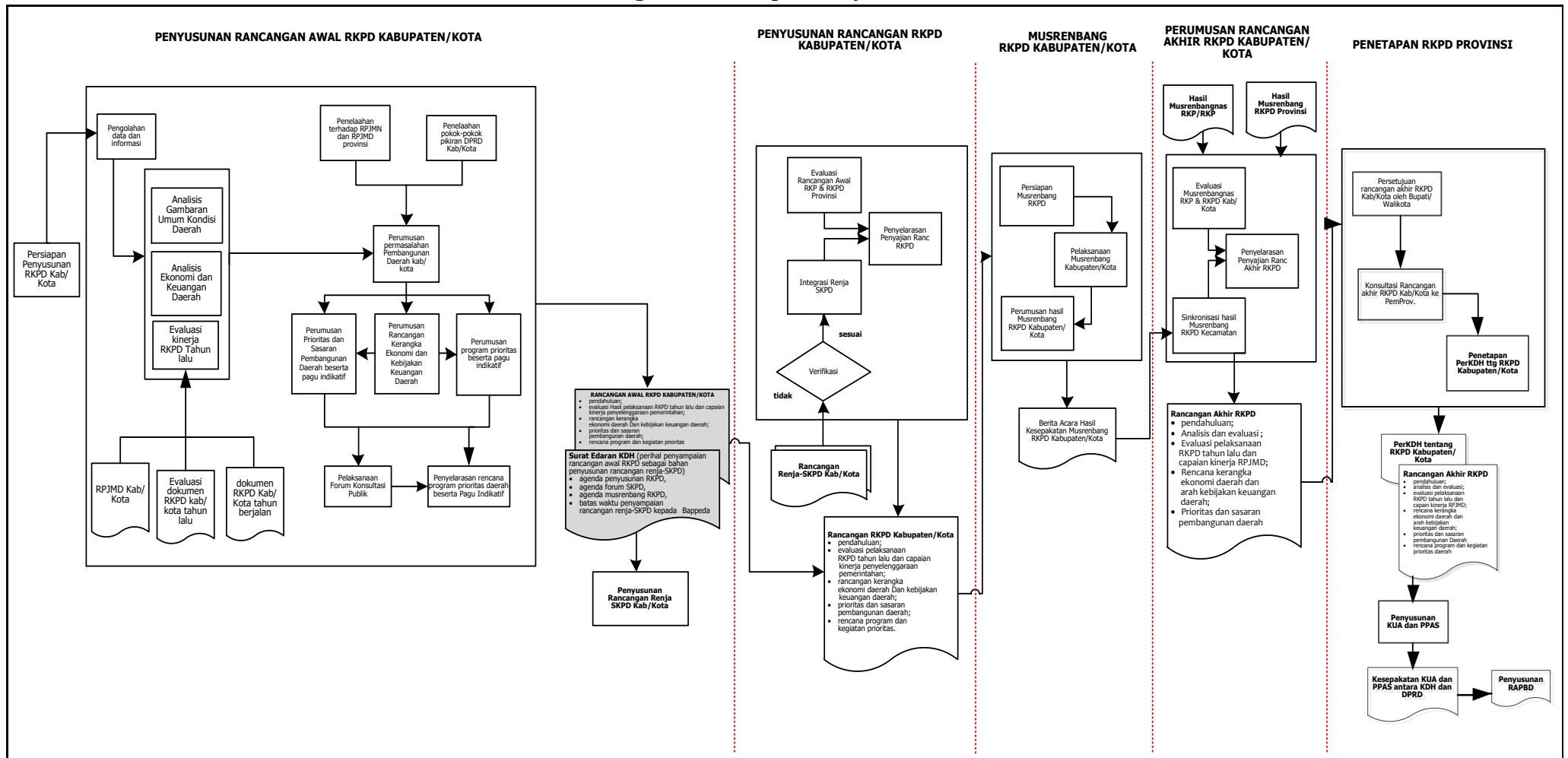
- **Sinergitas program dan kegiatan** diantara program/kegiatan ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional melalui Forum OPD maupun Musrenbang baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
- **Mempertimbangkan kemampuan fiskal keuangan daerah** dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan melalui penyusunan prioritas dari setiap OPD.
- Berpegang pada prinsip-prinsip **tata kelola Pemerintah yang bersih, profesional dan akuntabel serta menegakkan supremasi hukum** dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 diawali dengan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan pada bulan Januari 2017 dan Musrenbang Kecamatan pada Bulan Februari 2017. Selanjutnya dilaksanakan Forum OPD Kabupaten pada Minggu Kedua Bulan Maret 2017 dan kemudian untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dilaksanakan Musrenbang Kabupaten pada tanggal 23 Maret 2017. Hasil Kesepakatan dari Musrenbang Kabupaten dan usulan APBD Provinsi dan APBN tahun 2018 akan menjadi bahan pembahasan pada Musrenbang Provinsi Bengkulu dan Musrenbang Nasional yang diselenggarakan pada bulan April 2017.

Adapun tahapan penyusunan RKPD yaitu: tahap pertama: persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua: penyusunan rancangan awal RKPD dimana didalamnya terdapat 2 (dua) tahapan kegiatan; yaitu tahap perumusan rancangan awal RKPD dan tahap penyajian rancangan awal RKPD. Tahap ketiga: Penyusunan Rancangan RKPD yang meliputi perumusan rancangan RKPD yang didalamnya dilakukan evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan dilanjutkan penyajian rancangan RKPD. Tahap keempat: Musrenbang RKPD. Tahap kelima: perumusan rancangan akhir RKPD dan Tahap keenam: penetapan RKPD. Tahapan proses penyusunan RKPD Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana pada gambar bagan berikut :



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD





1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017, Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 55).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik itu di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Adapun penjelasan keterkaitan itu adalah sebagai berikut:

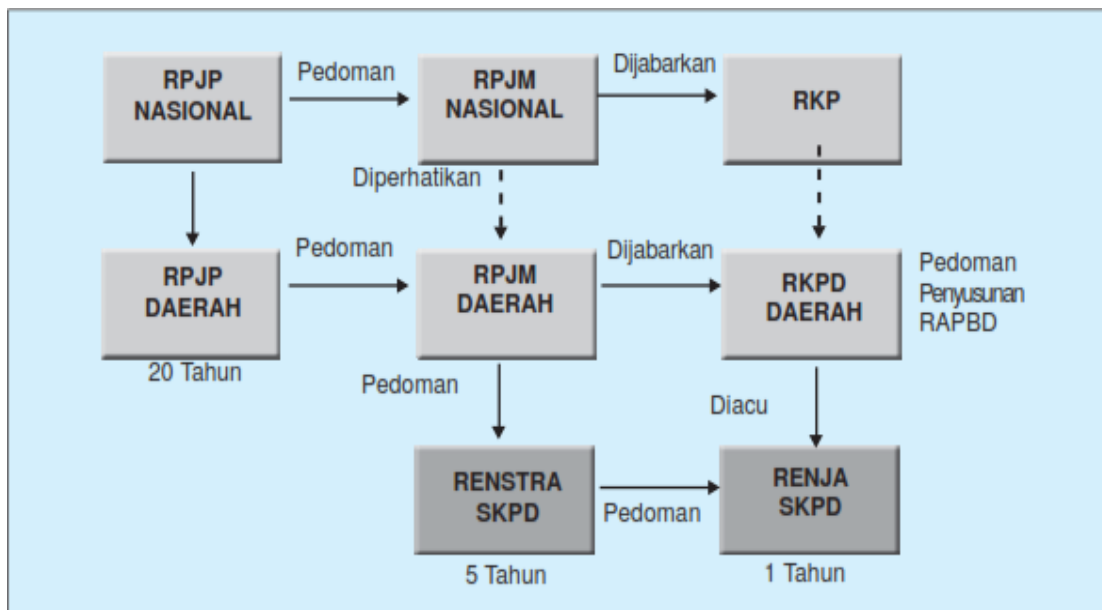
1. RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen tersebut berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, RPJPD Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di Propinsi Bengkulu, yang kemudian dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Kemudian RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyusunannya mengacu pada dokumen tersebut dan dijabarkan ke dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021. RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut agar tercapai keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan seutuhnya;
2. RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan operasionalisasi dari RPJMD Kabupaten



Bengkulu Selatan tahun 2016–2021 yang penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD atau dengan kata lain penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga sasaran dan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat tercapai secara optimal.

Hubungan atau keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, serta menguraikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah sebagai bahan acuan perencanaan program-program pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yang menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi Kabupaten Bengkulu Selatan, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber



pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi perkembangan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan yang disajikan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Bab VI. Penutup

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018.

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018. Dalam hal ini, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun dan disepakati selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Fungsi dan Tujuan penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan mencakup sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKA OPD;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, PPAS, RAPBD dan APBD;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD, sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat; dan
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Bengkulu Selatan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi memberikan gambaran mengenai kondisi daerah yang mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kabupaten Bengkulu Selatan.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan UU Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran adalah seluas 5.949,14 km². Kemudian pada Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran yang ditandai dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan pasca pemekaran seluas 1.186,10 km² atau 19,93 % yang merupakan wilayah daratan, sedangkan luas wilayah lautan dengan panjang garis pantai 60 km dan dengan luas pengelolaan 4 mil, maka luas keseluruhan wilayah lautan, yaitu 384 km² atau 38.400 ha. Dengan demikian Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan, yaitu 157.100 ha atau 1.570,10 km².

Kabupaten Bengkulu Selatan setelah pemekaran memiliki 11 (sebelas) kecamatan, dimana masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun luas wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1	Manna	33,17	2,80
2	Bunga Mas	35,08	2,96
3	Kota Manna	32,16	2,71
4	Pasar Manna	5,84	0,49
5	Kedurang	234,55	19,71
6	Kedurang Ilir	58,20	4,91
7	Seginim	61,52	5,19
8	Air Nipis	203,28	17,14
9	Pino	61,88	5,22
10	Ulu Manna	236,92	19,97
11	Pino Raya	233,50	18,84
	Jumlah	1.186,10	100 %

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

Ditinjau dari aspek kewilayahan (*spatial*) posisi Kabupaten Bengkulu Selatan cukup strategis, karena Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada jalur lintas yang menghubungkan



Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan (melalui Tanjung Sakti) dan Provinsi Lampung melalui Kabupaten Kaur. Secara administratif Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan langsung :

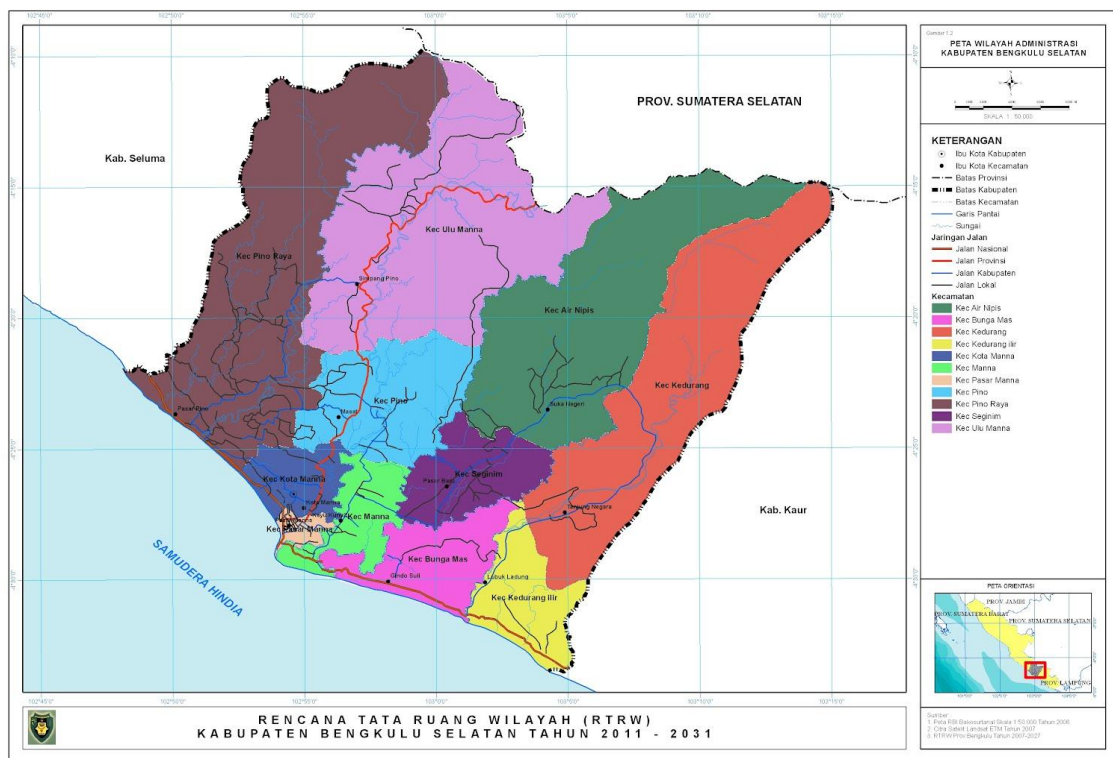
- Sebelah utara dengan Kabupaten Seluma
- Sebelah timur dengan Propinsi Sumatera Selatan
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Kaur
- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkulu Selatan secara geografis terletak pada $4^{\circ} - 5^{\circ}$ LS dan $102^{\circ} - 103^{\circ}$ BT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.

Keadaan Topografi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari daerah datar dan berbukit. Berdasarkan atas ketinggian dari permukaan laut, maka wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi atas: daerah yang berada pada ketinggian 0 - 25 m dpl seluas 7,73%, pada ketinggian 25 - 100 m dpl seluas 45,39 %, pada ketinggian 100 - 500 m dpl seluas 33,59%, pada ketinggian 500 - 1000 m dpl dengan luas 7,58%, pada ketinggian > 1000 m dpl dengan luas 5,7%.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

Dilihat dari tekstur, tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Selatan



sebagaimana tertuang dalam Bengkulu Selatan Dalam Angka (BSDA) Tahun 2016, luas daerah menurut tekstur tanah, yaitu :

- Tekstur halus seluas 83.120 Ha atau 70,08 %
- Tekstur sedang 18.875 Ha atau 15,91 %
- Tekstur agak kasar 16.615 Ha atau 14,01 %

Kemiringan tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan bervariasi, yaitu: wilayah yang mempunyai kemiringan 0 – 15 derajat seluas 45,86 % dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan, wilayah yang mempunyai kemiringan 15 - 25 Derajat seluas 39,66 % dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan. Wilayah yang mempunyai kemiringan 25 – 40 derajat seluas 10,46 %, wilayah yang mempunyai kemiringan > 40 derajat seluas 4,02 %,

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki sungai besar dan kecil yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Sungai tersebut antara lain: Air Manna, Air Bengkenang, Air Kedurang, Air Nelengau, Air Nipis, Air Pino, Air Manna Hijau dan Air Selali. Sungai di Kabupaten Bengkulu Selatan berfungsi sebagai sumber irigasi dan sumber air minum PDAM Tirta Manna.

Suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jarak dari pantai. Suhu rata-rata maksimum antara 30°C - 33°C dan suhu rata-rata minimum 22°C - 23°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata relatif antara 80-90%.

Iklim terbentuk oleh unsur-unsur cuaca, yaitu curah hujan, hari hujan, radiasi surya, penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin. Besarnya unsur-unsur pembentukan iklim dapat diuraikan sebagai berikut: menurut kriteria Schmid dan Ferguson dapat diklasifikasikan kedalam tipe iklim A, menurut kriteria Mohr, dapat diklasifikasikan dalam tipe iklim 1a, menurut kriteria Oldeman, dapat diklasifikasikan dalam tipe iklim B1, menurut kriteria Koppen, dapat diklasifikasikan kedalam tipe iklim Af.

3. Pola Ruang dan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan

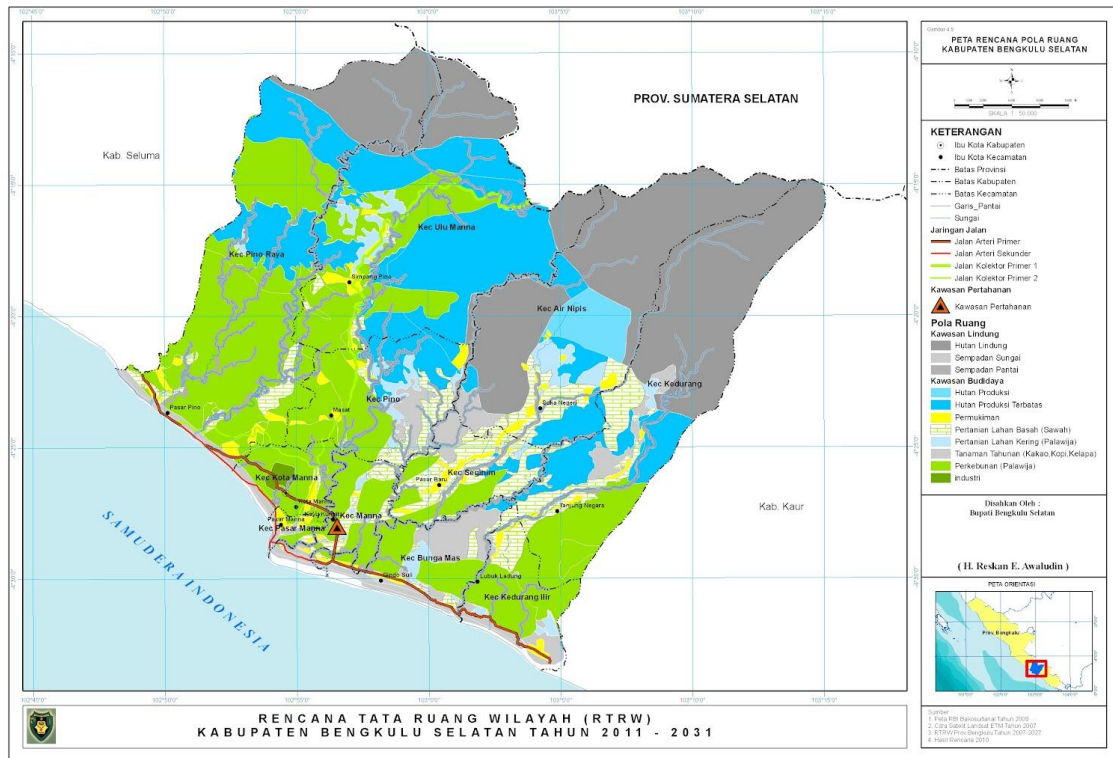
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan rencana distribusi peruntukkan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya.

Dalam rencana pengembangan struktur ruang di Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan penataan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Salah satu yang akan dilakukan dalam rencana struktur ruang adalah penataan pusat perkantoran yang akan dipusatkan pada satu titik lokasi, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga disusun rencana jaringan energi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan kurangnya energi yang dialami masyarakat selama ini.

Berkenaan dengan rencana pola ruang, perlu dilakukan evaluasi terhadap peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Hal ini penting mengingat di Kabupaten Bengkulu Selatan masih terdapat kawasan yang harus ditata dan dikelola kembali, terutama keberadaan dan peruntukan hutan. Berikut ini Peta rencana pola ruang dan data mengenai persentase luas hutan menurut fungsinya di Kabupaten Bengkulu Selatan.



Gambar 2.2
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

Tabel 2.2
Luas dan Persentase Hutan menurut Fungsinya

No	Fungsi Hutan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah
A.	Kawasan Suaka Alam/ Pelestarian Alam	53,7	0,1
	• Taman Nasional	-	-
	• Cagar Alam	-	-
	• Taman Wisata Alam	5,5	0,0
	• Taman Buru	-	-
	• Taman Hutan Raya	48,2	0,1
B.	Kawasan Hutan		
	1. Hutan Lindung	33.079	67,13
	2. Hutan Produksi Terbatas	14,566,96	29,56
	3. Hutan Produksi Tetap	1.579	3,20
C.	Area Penggunaan Lainnya	-	-
	Jumlah	49,278,66	100,00

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Kabupaten Bengkulu Selatan 2015



Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Berdasarkan penetapan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu (dalam RTRWP Bengkulu), kawasan hutan meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas maupun taman nasional yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan penggunaan ruangnya. Walaupun begitu, saat ini telah diajukan beberapa usulan peninjauan kembali dalam rangka melakukan pelepasan, perluasan maupun perubahan fungsi ruang yang ada saat ini merupakan kawasan lindung, hutan produksi maupun hutan produksi terbatas dalam rangka memaksimalkan fungsi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun review atau pengajuan peninjauan kawasan hutan di dalam RTRWP Provinsi Bengkulu yang terkait dengan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekomendasi Tim Terpadu Terhadap Usulan Review Kawasan Hutan
Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Kawasan Hutan	Luas Kawasan (Ha)	Usulan Perubahan (Ha)	Rekomendasi Perubahan (Ha)
1.	HL. Raja Mandara Reg. 32	20.727		
2.	HL. Bukit Riki Reg. 32A	4.370	APL 519	Tidak di ubah
3.	HL. Bukit Sanggul Reg. 37	7.982		
4.	HPT. Bukit Rabang Reg. 78	4.216.54	Tahura 101 Ha	Tahura 101 Ha
5.	HPT Peraduan Tinggi Reg. 79	9.158.42	APL 4.785	Tidak di ubah
6.	HPT. Air Keduran Reg. 81	1.192		
7.	HP. Air Bengkenang Reg 80	1.579	APL 1.927	APL. 222 Ha HP. 13537 Ha

Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang peruntukan ruangnya untuk fungsi lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan ruang terbuka hijau. Sedangkan kawasan yang berfungsi sebagai ruang kawasan budidaya terdiri dari kawasan yang peruntukannya untuk hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Struktur ruang di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan direncanakan untuk rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten dengan tujuan dasar agar tercipta sistem ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Bila dijabarkan lebih lanjut pengertian produktif dan berkelanjutan dalam konteks struktur ruang dimaknai sebagai suatu sistem dan hubungan fungsional antar pusat perkotaan yang efektif, efisien, mendorong peningkatan potensi masing-masing pusat (kawasan) secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

Adapun rencana sistem perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2030 sebagai berikut:



Tabel 2.4
Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2030

No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
1.	Manna (Kecamatan Kota Manna)	PKW	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemerintahan • Pusat Perdagangan dan jasa • Pusat Pelayanan Pendidikan, Kesehatan. • Permukiman perkotaan • Industri Pengolahan hasil Pertanian dan Rumah Tangga
2.	Pasar Bawah (Kecamatan Pasar Manna)	PKW	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Permukiman perkotaan • Pengembangan sub sektor Perikanan • Industri pengolahan hasil Pertanian dan Rumah Tangga
3.	Kayu Kunyit (Kecamatan Manna)	PKW	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman perkotaan • Pertambangan (golongan c) • Perkebunan dan sub sektor pertanian • Pariwisata • Indutri pertanian dan pengolahan rumah tangga.
4.	Masat (Kecamatan Pino)	PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Agro Industri • Pusat Agropolitan • Perkebunan • Pertanian • Permukiman perdesaan
5.	Simpang Pino (Kecamatan Ulu Manna)	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Perkebunan • Kawasan Hutan Konservasi • Perternakan • Pertambangan • Pariwisata • Permukiman perdesaa
6.	Lubuk Ladung (Kec. Kedurang Ilir)	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Agroindustri • Perkebunan • Perikanan • Pertambangan • Peternakan • Permukiman pedesaan
7.	Gindo Suli (kec. Bunga Mas)	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan • Pariwisata buatan • Industri pengolahan hasil pertanian • Permukiman pedesaan
8.	Tanjung Negara (Kec. Kedurang)	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Perkebunan • Kawasan hutan konservasi • Peternakan • Perikanan darat • Permukiman pedesaan
9.	Pasar Baru	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Peternakan



No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
	(Kec. Seginim)		<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan darat • Pertanian tanaman pangan • Perkebunan • Permukiman pedesaan
10.	Suka Negeri (Kec. Air Nipis)	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan • Kehutanan • Pertanian • Perikanan darat • Permukiman pedesaan
11.	Pasar Pino (Kec. Pino Raya)	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan • Pertanian • Perikanan • Peternakan • Kehutanan • Permukiman pedesaan

Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

B. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Pertanian

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi di bidang pertanian yang cukup besar dan menjanjikan apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Pertanian tanaman pangan merupakan komoditi penyumbang pendapatan daerah yang cukup signifikan dengan hasil produksi yang relatif meningkat setiap tahun. Hal ini merupakan potensi yang baik untuk terus dikembangkan dalam rangka menopang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat karena Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Pada tahun 2015, berdasarkan angka statistik pertanian yang dikumpulkan oleh Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat luas lahan sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 11.036 ha yang terdiri dari 8.131 ha lahan irigasi dan 2.905 ha lahan non irigasi. Sedangkan luas lahan pertanian bukan sawah tercatat seluas 75.067 ha, terdiri dari 27.544 ha lahan perkebunan, 13.595 ha hutan rakyat, 8.729 ha tegal/ kebun, 976 ha ladang/ huma, 924 ha padang penggembalaan/ rumput, 8.752 ha lahan yang sementara tidak diusahakan dan 14.547 ha lahan lainnya.

2. Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan sangat luas dan menjadi potensi daerah yang potensial untuk terus dikelola dan dikembangkan, relatif merata dan menyebar di seluruh wilayah kabupaten, dengan jenis tanaman yang bervariasi. Tanaman perkebunan yang menjadi komoditi unggulan adalah kelapa sawit dimana produksi pada tahun 2015 sebesar 145.559,44 ton, kemudian diikuti dengan komoditi lain seperti karet, kopi, coklat dan kelapa. Selain itu terdapat juga komoditas lain yang juga diusahakan oleh rakyat namun jumlahnya relatif kecil diantaranya lada, kayu manis, cengkeh, kemiri, pinang, aren, kapuk, nilam dan jahe.

3. Pertambangan dan Industri

Di bidang pertambangan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi bahan galian pertambangan yang prospeknya cukup baik untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan di masa yang akan datang, sebagai penopang sumber perekonomian daerah. Namun dari potensi yang ada tersebut, sampai saat ini baru beberapa potensi pertambangan yang di eksploitasi dan itu pun



masih termasuk kategori bahan galian yang kecil seperti batu sarak/batu tulis dan batu gamping. Kedepan diharapkan potensi-potensi yang masih terkandung di dalam perut bumi Sekundang Setungguan dapat dieksploitasi dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten yang maju, mandiri dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus.

Eksplorasi dan pemanfaatan bahan galian pertambangan harus mendapat perhatian yang lebih dari para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah dan investor dengan tetap mengedepankan prinsip sustainable development serta kepentingan masyarakat, sehingga nantinya tidak akan memunculkan permasalahan dan ketidaksesuaian dengan kehendak masyarakat, yang mana pada saat ini masih sering terjadi konflik berkaitan dengan usaha pertambangan galian C.

Beberapa potensi bahan galian dan pertambangan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.5
Potensi Bahan Galian Pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Bahan Galian/ <i>Minings</i>	Lokasi/ <i>Location</i>
1.	Batu Gamping	Desa Batu Ampar, Kedurang Disekitar Air Bengkenang, Hulu air Luwangan Pematang Gaung
2.	Batu Sarak/ Batu Tulis	Desa Tanjung Selatan, Seginim Hulu Air Bengkenang Seginim
3.	Pasir Lempungan	Di Air Tebu Telur, Seginim (Desa Tj. Tengah)
4.	Posphat Guano	Gua dekat Pertemuan Air Kedurang dan Air Cawang Alun, Hulu Air Kedurang
5.	Granit	Bukit Lekendi, Bukit Raja Mendara, Kec. Seginim, Pino, Kedurang
6.	Diorit	Sebelah Utara dan Timur, Bukit Raja Mendara
7.	Andesit	Bukit Raja Mendara (2000 Ha)
8.	Marmer (<i>Marble</i>)	Desa Sukarami Kec. Seginim
9.	Mineral Sulfida	Kec. Pino, Seginim dan Kedurang
10.	Batu Rijang (Radio Laria Chert)	Hulu Air Bengkenang
11.	Mineral Ubahan	- Dijumpai di tempat-tempat penyelidikan di Kec. Pino, Seginim dan Kedurang - Air Purusan Bengkenang (Hulu Air Bengkenang)
12.	Batuan Piroklastik	Di sekitar Air Manna dekat Masat
13.	Biji Besi	Perbatasan Bengkulu Selatan – Lahat
14.	Minyak (Blok Bengkulu) Pasir Besi	Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur Pantai Selali - Pantai Sulau, Kec. Pino Raya, Kec. Kedurang Ilir
15.	Emas	Seginim, Ulu Manna, Kedurang

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2016

4. Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah pesisir yang langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah barat. Kondisi ini memberikan dukungan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat karena menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Potensi perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi menjadi



perikanan tangkap, perikanan budidaya dan perairan umum. Potensi perikanan budidaya tampak berkembang khususnya di Kecamatan Air Nipis dan Seginim. Sedangkan untuk potensi perikanan laut hanya ada di lima kecamatan yaitu Kecamatan Manna, Bunga Mas, Kota Manna, Pasar Manna, Kedurang Ilir, dan Pino Raya.

5. Peternakan

Potensi Kabupaten Bengkulu Selatan pada sektor peternakan cukup menjanjikan karena populasi ternak cukup besar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berbagai jenis ternak. PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan produksi peternakan merupakan salah satu faktor penyumbang yang potensial meskipun bukan merupakan faktor yang utama. Peternakan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar diusahakan oleh masyarakat yang tersebar di setiap kecamatan. Jenis ternak yang paling banyak adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging dan itik.

6. Sosial, Budaya dan Agama

Kabupaten Bengkulu Selatan kaya akan bermacam potensi yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi daerah, diantaranya keberagaman budaya dan agama. Keberagaman yang ada tersebut diikat dalam hubungan sosial yang baik dan harmonis. Hal ini tercermin dalam perilaku masyarakat saling membantu, bekerja sama dan bahu-membahu terutama pada prosesi 3 (tiga) siklus kehidupan manusia yaitu pada saat kelahiran (*aqiqah*), perkawinan (*walimatul ursy*) dan kematian (*takziah*). Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki berbagai macam suku seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Suku di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Suku	Persentase (%)
1	Serawai	76,87
2	Pasemah	13,39
3	Jawa	2,89
4	Minangkabau	2,21
5	Melayu lainnya	1,06
6	Sunda	0,95
7	Batak	0,73
8	Lainnya	1,89
Jumlah		100,00

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

Keberagaman suku yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi embrio munculnya beraneka macam kekayaan budaya dalam bentuk seni tradisi maupun adat istiadat yang apabila dikemas dan dikembangkan dengan baik akan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah. Beberapa kekayaan budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertera dalam tabel berikut:



Tabel 2.7
Kekayaan Budaya (Tari-tarian dan Adat Istiadat) di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Tari - Tarian	Adat Istiadat
1	Tari Sekapur Sirih	Seni Bedandang Mutus Tari
2	Tari Napa	Dundang Padi
3	Tari Rawas	Bimbang Adat
4	Tari Kain	Acara Kayiak Nari
5	Tari Piring	Berzanji
6	Tari Payung	Malam Gegerit
7	Tari Berempat	Padu Padan Kulau
8	Tari Setangan	
9	Tari Mak Inang	
10	Tari Andun	

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

Selain keanekaragaman suku dan budaya adat, penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan juga memiliki keberagaman dalam keyakinan agama. Secara nyata terlihat bahwa kerukunan hidup antar umat beragama tetap terjaga dan terpelihara secara baik. Hal ini memberikan energi positif bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang saling asah, asih dan asuh. Mayoritas penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan memeluk agama Islam yaitu sebanyak 99,63 persen penduduk dan sisanya 0,37 persen beragama non muslim seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pemeluk Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Agama	Persentase (%)
1	Islam	99,63
2	Protestan	0,13
3	Katholik	0,22
4	Hindu	0,01
5	Budha	0,01

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2016

7. Pariwisata

Di bidang kepariwisataan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi dan daya tarik wisata yang dapat dikelola dan dikembangkan sebagai salah satu potensi yang mampu memberikan *value added* bagi daerah sehingga akan dapat menjadi media promosi bagi daerah agar dikenal baik dalam lingkup lokal, nasional bahkan internasional. Tentunya apabila potensi wisata ini dikembangkan secara maksimal akan mampu menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam, yang akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung sektor perekonomian juga akan menggeliat dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:



Tabel 2.9
Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Lokasi / Potensi Wisata	Lokasi
1	Pantai Wisata Pasar Bawah	Kel. Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
2	Air Terjun Geluguran	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
3	Taman Merdeka	Jenderal Sudirman Kec. Kota Manna
4	Muara Kedurang	Desa Tanjung Aur, Kec. Bunga Mas
5	Tebat Rukis	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna
6	Air Terjun Tiga Tingkat	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
7	Goa Suruman	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
8	Danau Ulu Seginim	Desa Tanjung Beringin, Kec. Seginim
9	Pantai Mengkudum	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
10	Bendungan Air Nipis	Desa Plk Bengkerung, Kec. Air Nipis
11	Arung Jeram Air Manna	Kec. Ulu Manna – Pino
12	Lubuk Supit	Desa Sukarami Kec. Air Nipis
13	Sirkuit Balap	Pagar Dewa, Kec. Kota Manna
14	Kolam Renang Pasar Bawah	Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
15	Pantai Bengkenang	Desa Ketaping, Manggul, Kec. Manna
16	Tebat Gelumpai	Desa Batu Lambang, Kec. Pasar Manna
17	Air Terjun Cawang	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
18	Keramat Bujang Bandan	Kedurang
19	Telaga Rajak Besi	Kedurang
20	Tebat Besar	Desa Merambung, Kec. Pino
21	Air Terjun Padang Lakaran	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
22	Tebat Niniak	Desa Selali, Kec. Pino Raya
23	Danau Ilir	Maras, Keban Jati, Air Nipis
24	Danau Muara Danau	Desa Muara Danau Kecamatan Seginim
25	Pantai Ketaping	Desa Ketaping, Kec. Manna
26	Wisata Pancur Mas	Desa Selali, Kec. Pino Raya

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2014-2025

Berdasarkan indikasi program penataan ruang bidang pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kerangka Acuan Kerja penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berbasis Tahun 2013 maka diprioritaskan untuk pengembangan :

1. Kawasan wisata bahari terpadu di Kecamatan Pasar Manna, dengan lokasi Pantai Pasar Bawah, Tebat Rukis dan Tebat Gelumpai.
2. Pengembangan Taman Wisata Alam Lubuk Tapi – Kayu Ajaran, dengan lokasi Air Terjun Geluguran dan Arung Jeram Air Manna

Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam dan buatan lainnya meliputi Danau Ulu Air Seginim, Pantai Kedurang, Pantai Bengkenang dan Pantai Makhudum.



C. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk ke dalam salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki kerawanan terhadap bencana. Untuk itu dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi risiko atas bencana yang akan terjadi dan sebagai upaya untuk menjalankan mandat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB), Kabupaten Bengkulu Selatan telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan bencana, diantaranya menetapkan strategi penyusunan mitigasi bencana dengan arah kebijakan antara lain meningkatkan kesiagaan dan pencegahan dini, melaksanakan tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana, dan penanganan pasca bencana karena Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada jalur *Ring Of Fire* sebagaimana ditunjukkan pada peta rawan bencana sebagai berikut :

Gambar 2.3
Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor. Wilayah yang memiliki tingkat kerawanan gempa dan Tsunami paling tinggi adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai diantaranya Kecamatan Kedurang Iilir, Bunga Mas, Pasar Manna, Manna dan Pino Raya sedangkan wilayah yang rawan terhadap bencana banjir dan longsor diantaranya adalah Kecamatan Ulu Manna, Seginim.

D. Demografi

Penduduk adalah modal dasar pembangunan yang harus diberdayakan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak justru dapat menjadi beban ekonomi jika pemberdayaan penduduk tidak berhasil dalam meningkatkan kualitas manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun taraf hidupnya. Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan menurut hasil proyeksi BPS di tahun 2015 mencapai 152.194 jiwa yang terdiri dari 76.473 laki- laki dan



75.721 perempuan. Selama kurun 2011–2015, laju pertumbuhan (*Growth Rate*) penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar 1,2 % lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan nasional sebesar 1,5 %. Adapun jumlah penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut :

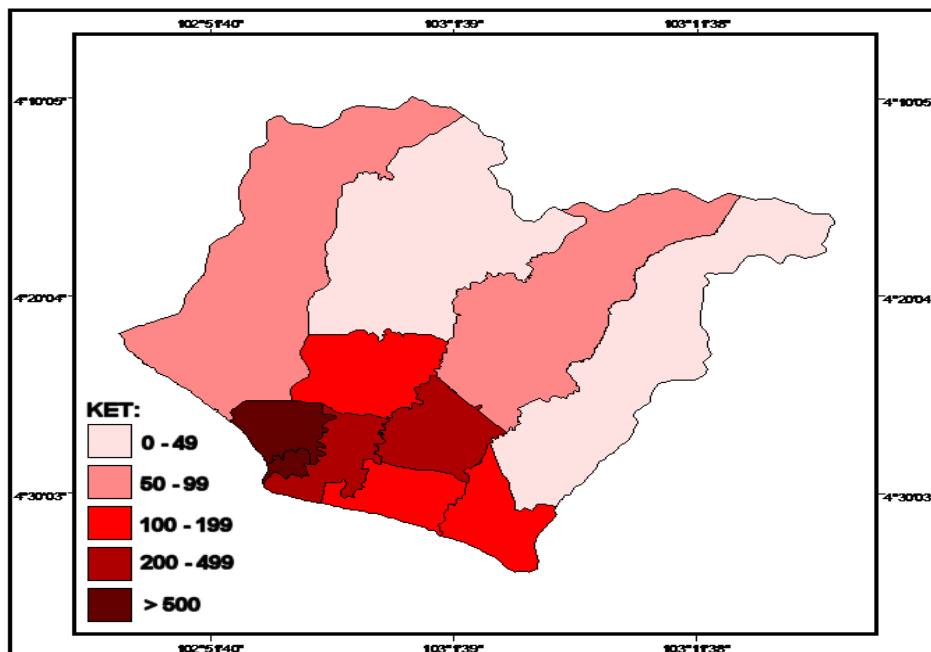
Tabel 2.10
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk Per Km ²
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Manna	6.863	6.969	13.832	417
2	Kota Manna	15.050	15.224	30.274	941
3	Kedurang	5.347	5.196	10.543	45
4	Bunga Mas	3.045	3.061	6.106	174
5	Pasar Manna	9.141	9.322	18.463	3.161
6	Kedurang Ilir	4.021	3.882	7.903	136
7	Seginim	7.950	7.755	15.705	255
8	Air Nipis	5.459	5.320	10.779	53
9	Pino	5.812	5.759	11.571	187
10	Pino Raya	9.891	9.570	19.461	87
11	Ulu Manna	3.894	3.663	7.557	32
	Jumlah	76.473	75.721	152.194	128

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2016

Adapun sebaran penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa penduduk terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Pasar Manna dan Kota Manna seperti tergambar dalam peta tematik berikut ini:

Gambar 2.4
Peta Tematik Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (jiwa/ km²)



Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2016



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan dalam skala nasional maupun pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan salah satu indikatornya dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, karena aspek ini sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Selatan. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku dan berdasarkan atas dasar harga konstan.

Penyajian PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku memperlihatkan besaran dari nilai tambah bruto masing-masing sektor sesuai dengan keadaan pada tahun tertentu. Dalam hal ini penilaian terhadap produksi, biaya antara ataupun nilai tambahnya dilakukan dengan menggunakan harga yang berlaku pada masing-masing tahun yang bersangkutan. Pada harga berlaku jika dilihat dari series perkembangan PDRB/pendapatan regional dapat diartikan suatu perkembangan yang disebabkan oleh peningkatan produksi, tetapi juga karena meningkatnya harga barang. Oleh karena itu penyajian atas dasar harga berlaku tersebut masih dipengaruhi oleh adanya faktor inflasi atau deflasi

Tabel 2.11
PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 -2015 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	993.238,7	1.112.464,9	1.235.882,9	1.377.182,4	1.489.064,3
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	707.732,6	795.448,0	887.450,0	995.858,9	1.074.659,9
	a. Tanaman Pangan	396.037,1	447.234,9	494.807,6	542.275,2	581.874,5
	b. Tanaman Hortikultura	31.883,1	36.149,2	40.670,8	45.482,3	49.068,7
	c. Perkebunan	140.378,76	164.314,61	185.576,14	215.552,39	230.758,89
	f. Peternakan	120.419,67	126.451,10	142.681,13	164.710,03	183.232,55
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	19.013,91	21.298,28	23.714,41	27.838,93	29.725,26
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	23.638,00	25.518,95	27.883,40	30.342,41	31.793,81
	3 Perikanan	261.868,10	291.497,94	320.529,46	350.981,13	382.610,59
B	Pertambangan dan Penggalian	74.567,79	81.340,37	85.843,02	94.242,22	101.173,84
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	74.567,79	81.340,37	85.843,02	94.242,22	101.173,84
C	Industri Pengolahan	70.612,89	79.538,30	96.138,89	115.269,60	129.787,55
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	64.006,44	72.203,65	88.036,93	106.397,31	119.778,99



Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014*	2015**
	3 Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Industri Tekstil dan Pakazian Jadi	71,81	76,91	84,20	92,58	101,80
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	95,03	103,70	110,17	116,78	126,15
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	211,97	228,70	247,59	268,57	292,31
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2.186,17	2.401,50	2.672,57	2.933,11	3.347,65
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	347,58	386,44	436,04	481,94	544,87
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.211,42	2.502,74	2.757,21	3.035,94	3.426,03
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	23,02	26,11	27,00	28,73	32,40
	15 Industri Furnitur	1.191,24	1.314,68	1.448,12	1.564,99	1.755,59
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	268,22	293,88	318,67	349,65	381,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.537,00	1.673,75	1.583,45	1.886,42	2.399,56
	1 Ketenagalistrikan	1.516,92	1.650,98	1.556,98	1.856,73	2.365,07
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	20,08	22,77	26,47	29,69	34,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.262,10	5.327,75	5.378,25	5.474,20	5.959,69
F	Konstruksi	121.663,66	142.600,98	166.819,66	190.244,07	211.658,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	376.661,05	418.142,34	471.354,98	530.069,19	592.170,42
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	90.763,49	101.097,86	113.108,20	127.465,03	142.947,32
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	285.897,56	317.044,48	358.246,78	402.604,16	449.223,09
H	Transportasi dan Pergudangan	136.602,46	153.033,87	165.560,18	185.142,12	215.741,18
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	130.524,57	146.101,38	157.489,43	176.151,57	205.818,60
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	6.077,89	6.932,49	8.070,75	8.990,55	9.922,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38.266,96	44.794,54	50.687,63	57.738,93	68.326,46
	1 Penyediaan Akomodasi	2.127,58	2.489,84	2.853,78	3.373,75	3.768,63
	2 Penyediaan Makan Minum	36.139,37	42.304,70	47.833,85	55.746,08	64.557,83
J	Informasi dan Komunikasi	75.905,59	78.713,90	86.021,18	95.743,53	107.124,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	149.279,67	176.334,77	205.338,38	222.151,00	241.896,83
	1 Jasa Perantara Keuangan	138.960,61	164.766,71	192.292,33	207.216,70	224.690,92
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	321,00	353,95	397,52	450,76	494,87
	3 Jasa Keuangan Lainnya	9.957,06	11.169,11	12.597,33	14.423,69	16.640,71
	4 Jasa Penunjang Keuangan	41,00	45,00	51,00	59,85	70,33
L	Real Estate	106.251,55	119.213,40	131.239,71	149.320,34	170.063,50



Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014*	2015**
M,N	Jasa Perusahaan	5.802,75	6.400,29	7.176,23	8.247,69	9.737,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	216.880,33	256.741,74	301.347,14	345.030,79	414.390,60
P	Jasa Pendidikan	118.287,56	138.134,09	158.939,10	178.648,40	203.003,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.701,81	33.376,22	38.667,57	44.690,68	53.006,25
R,S, T,U	Jasa lainnya	14.389,88	15.434,36	17.354,96	19.427,21	23.169,35
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2.533.911,75	2.863.265,58	3.201.866,93	3.582.261,68	4.038.673,88

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Lapangan Usaha 2011-2015

Tabel diatas menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan masih didominasi oleh tiga lapangan usaha atau kategori utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan distribusi persentase rata-rata dari tahun 2011-2015 sebesar 37,46 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,93 persen; serta Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,99 persen. Distribusi persentase pada PDRB harga berlaku menunjukkan struktur perekonomian atau peranan pada setiap lapangan usaha atau kategori ekonomi suatu wilayah tertentu.

Penyajian PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar, semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tahun dasar. Penyajian seperti ini akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan Berikut ini disajikan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan dengan pendekatan produksi/ lapangan usaha:

Tabel 2.12
PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	993.238,7	1.112.464,9	1.235.882,9	1.377.182,4	1.489.064,3
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	707.732,6	795.448,0	887.470,0	995.858,9	1.074.659,9
	a. Tanaman Pangan	396.037,1	447.234,9	494.807,6	542.275,2	581.874,5
	b. Tanaman Hortikultura	31.883,1	36.149,2	40.670,8	45.482,3	49.068,7
	c. Perkebunan	140.378,76	164.314,61	185.596,14	215.552,39	230.758,89
	f. Peternakan	120.419,67	126.451,10	142.681,13	164.710,03	183.232,55
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	19.013,91	21.298,28	23.714,41	27.838,93	29.725,26
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	23.638,00	25.518,95	27.883,40	30.342,41	31.793,81
	3 Perikanan	261.868,10	291.497,94	320.529,46	350.342,41	382.610,59
B	Pertambangan dan Penggalian	74.567,79	81.340,37	85.843,02	94.242,22	101.173,84
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Biji Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	74.567,79	81.340,37	85.843,02	94.242,22	101.173,84
C	Industri Pengolahan	70.612,89	79.538,30	96.138,89	115.269,60	129.787,55



Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014*	2015**
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	64.006,44	72.203,65	88.036,93	106.397,31	119.778,99
	3 Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	71,81	76,91	84,20	92,58	101,80
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	95,03	103,70	110,17	116,78	126,15
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	211,97	228,70	247,59	268,57	292,31
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2.186,17	2.401,50	2.672,57	2.933,11	3.347,65
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	347,58	386,44	436,04	481,94	544,87
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.211,42	2.502,74	2.757,21	3.035,94	3.426,03
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	23,02	26,11	27,40	28,73	32,40
	15 Industri Furnitur	1.191,24	1.314,68	1.448,12	1.564,99	1.755,59
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	268,22	293,88	318,67	349,65	381,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.537,00	1.673,75	1.583,45	1.886,42	2.399,56
	1 Ketenagalistrikan	1.516,92	1.650,98	1.556,98	1.856,73	2.365,07
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	20,08	22,77	26,47	26,69	34,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.262,10	5.327,75	5.378,25	5.474,20	5.959,69
F	Konstruksi	121.663,66	142.600,98	166.819,66	190.244,07	211.658,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	376.661,05	418.142,34	471.354,98	530.069,19	592.170,42
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	90.763,49	101.097,86	113.108,20	127.465,03	142.947,32
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	285.897,56	317.044,48	358.246,78	402.604,16	449.223,09
H	Transportasi dan Pergudangan	136.602,46	153.033,87	165.560,18	185.142,12	215.741,18
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	130.524,57	146.101,38	157.489,43	176.151,57	205.818,60
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	6.077,89	6.932,49	8.070,75	8.990,55	9.922,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38.266,96	44.794,54	50.687,63	59.119,84	68.326,46
	1 Penyediaan Akomodasi	2.127,58	2.489,84	2.853,78	3.373,75	3.768,63
	2 Penyediaan Makan Minum	36.139,37	42.304,70	47.833,85	55.746,08	64.557,83
J	Informasi dan Komunikasi	75.905,59	78.713,90	86.021,18	95.743,53	107.124,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	149.279,67	176.334,77	205.338,38	222.151,00	241.896,83
	1 Jasa Perantara Keuangan	138.960,61	164.766,71	192.292,33	207.216,70	224.690,92
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	321,00	353,95	397,52	450,76	494,87



Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014*	2015**
	3 Jasa Keuangan Lainnya	9.957,06	11.169,11	12.597,33	14.423,69	16.640,71
	4 Jasa Penunjang Keuangan	41,00	45,00	51,20	59,85	70,33
L	Real Estate	106.251,55	119.213,40	131.239,71	149.320,34	170.063,50
M,N	Jasa Perusahaan	5.802,75	6.400,29	7.176,23	8.247,69	9.737,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	216.880,33	256.741,74	301.347,14	345.030,79	414.390,60
P	Jasa Pendidikan	118.287,56	138.134,09	158.939,10	178.648,40	203.003,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.701,81	33.376,22	38.667,57	44.690,68	53.006,25
R,S, T,U	Jasa lainnya	14.389,88	15.434,36	17.354,96	19.427,21	23.169,35
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2.533.911,75	2.863.265,58	3.225.333,19	3.621.889,72	4.038.673,88

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Lapangan Usaha 2011-2015

Pertumbuhan ekonomi pada suatu lapangan usaha atau kategori diperoleh dengan membandingkan nilai tambah kategori pada suatu tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun sebelumnya dan harga konstan. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan diperkirakan tumbuh sebesar 5,14 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai klimaksnya dengan pertumbuhan sebesar 6,58 persen.

2. Laju Inflasi

Salah satu indeks yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam suatu kurun tertentu adalah indeks harga konsumen (IHK). Perubahan yang terjadi pada IHK menyebabkan inflasi atau deflasi yang hanya dihitung di satu kota saja yaitu Kota Bengkulu. Asumsi yang digunakan pada bahasan ini adalah pola konsumsi yang sama antara penduduk di Kota Bengkulu dan Kota Manna sehingga perubahan harga yang terjadi kurang lebih menunjukkan perkiraan perubahan harga yang juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya di Kota Manna atau wilayah perkotaan. Disamping IHK perkotaan, BPS juga menghitung IHK perdesaan.

Pada kurun waktu 2010 – 2015, inflasi yang terjadi berfluktuasi. Harga- harga kelompok tertentu menunjukkan gejolak perubahan harga yang cukup tinggi. Misalnya, tahun 2010 kelompok bahan makanan sebesar 25,28 persen; tahun 2011 kelompok sandang sebesar 12,39 persen; tahun 2012 kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 12,32 persen; tahun 2013 dan 2014 kelompok bahan makanan sebesar 15,04 persen dan 17,76 persen, dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 16,37 persen dan 13,96 persen; dan tahun 2015 kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 11,38 persen.

Perubahan harga yang tinggi disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap suatu produk barang dan jasa dan tidak diimbangi oleh ketersediaan barang dan jasa di pasaran. Pengurangan subsidi oleh pemerintah atau kenaikan harga bbm dapat menjadiefek domino bagi penyebab kenaikan harga komoditi barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga yang tidak terkendali dan lama akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Secara makro, hal ini dapat menjadi salah satu faktor perlambatan ekonomi suatu wilayah. Laju inflasi umum atau total pada tahun 2010-2015 tersaji pada tabel berikut :



Tabel 2.13
Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2011 - 2015 (%)*

No	Kelompok Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1	Umum	3,96	4,61	9,94	10,85	3,25	6,52
2	Bahan makanan	-1,68	3,35	15,04	17,76	0,51	6,99
3	Makanan jadi, Minuman, dan Rokok	6,32	7,31	6,36	6,64	6,02	6,53
4	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	7,39	1,54	6,54	8,23	3,36	5,41
5	Sandang	12,39	4,80	2,09	3,82	4,33	5,48
6	Kesehatan	5,61	5,67	6,92	6,53	7,54	6,454
7	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8,94	12,32	3,11	5,62	11,38	6,27
8	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	2,06	4,10	16,37	13,96	-0,05	7,28

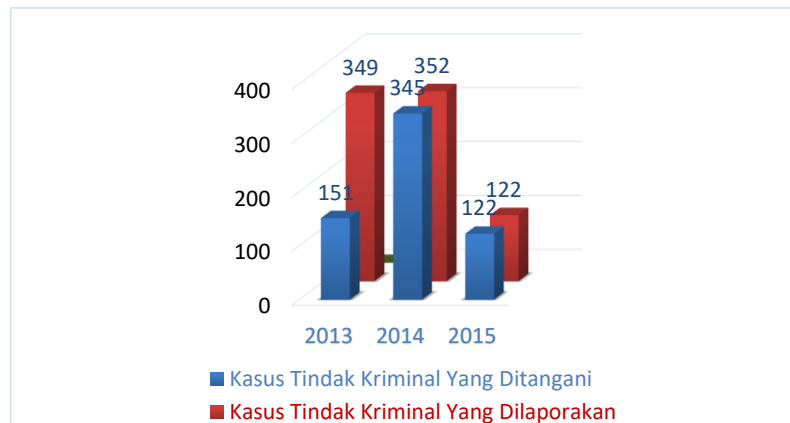
Keterangan: *) Merujuk kepada inflasi di Kota Bengkulu

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu tahun 2015

3. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka fluktuasi, dengan modus kejahatan yang bermacam-macam. Pada tahun 2015, angka kriminalitas yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh pihak berwajib mencapai angka 122 kasus dengan kasus yang dilaporkan sebanyak 122, turun dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 345 kasus dengan kasus yang dilaporkan sebanyak 352. Berikut adalah Grafik angka kriminalitas yang ditangani dan yang dilaporkan.

Gambar 2.5
Angka Kriminalitas



Sumber: Pengolahan Data BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di seluruh daerah atau negara manapun. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, ketersediaan data mengenai kemiskinan penting dibutuhkan sebagai salah satu instrumen dalam pengambilan kebijakan yang berfokus kepada perbaikan kondisi hidup orang miskin. Dalam penghitungan kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data



yang digunakan pada level kabupaten/kota adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional. Dalam konteks bahasan ini, kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan absolut.

Garis kemiskinan (GK) adalah penjumlahan dari nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang dikonsumsi atau setara 2100 kilokalori perkapita/ hari dan penjumlahan dari nilai kebutuhan minimum dari beberapa komoditi non makanan terpilih. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita/ bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu
Tahun 2011-2015 (Ribuan)

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Bengkulu Selatan	33,6	33,7	33,1	34,5
2	Rejang Lebong	43,1	46,8	45,8	46,0
3	Bengkulu Utara	38,7	40,2	39,5	42,2
4	Kaur	25,1	26,3	25,2	26,4
5	Seluma	37,8	39,7	38,9	42,5
6	Muko Muko	21,6	22,0	21,7	23,7
7	Lebong	12,9	13,7	13,4	13,4
8	Kepahiang	19,5	21,0	20,5	22,2
9	Bengkulu Tengah	6,7	7,6	8,7	8,9
10	Kota Bengkulu	71,5	72,4	69,5	74,3
PROVINSI BENGKULU		310,5	323,5	316,5	334,1

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Pada tahun 2015, BPS memprediksi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 22,76 persen atau meningkat bila dibandingkan angka tahun sebelumnya. Jika melihat perbandingan antarkabupaten, Kabupaten Seluma dan Kaur adalah yang tertinggi persentasenya yaitu 22,98 persen dan 22,87 persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode 2011 - 2014 berturut-turut adalah 22,55 persen, 22,97 persen, 22,59 persen dan 21,91 Persen. Angka lainnya yang dicermati adalah nilai P1 yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi Bengkulu. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin menjauhi garis kemiskinan, sebaliknya kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin meningkat atau melebar (lihat pada P2).

Untuk analisis lebih lanjut, garis kemiskinan (GK) digunakan untuk membagi penduduk menurut status kemiskinannya. Pengeluaran perkapita/ bulan $\leq 0,8$ GK disebut sangat miskin, pengeluaran perkapita/ bulan ≤ 1 GK disebut miskin, $1 \text{ GK} < \text{pengeluaran perkapita/bulan} \leq 1,2$ GK disebut hampir miskin, dan $1,2 \text{ GK} < \text{pengeluaran perkapita/bulan} < 1,6$ GK disebut rentan miskin lainnya. Jika menggunakan konsep diatas maka batas pengeluaran untuk penduduk sangat miskin adalah \leq Rp. 229.623,2 perkapita/ bulan. Berikut ini adalah tabel garis kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dari tahun 2012-2015.



Tabel 2.15
Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2015
(Rupiah Per Kapita Sebulan)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Bengkulu Selatan	266.465	278.823	287.029	294.328
2	Rejang Lebong	299.903	320.366	334.237	346.981
3	Bengkulu Utara	272.910	284.806	292.684	302.989
4	Kaur	236.930	248.571	256.321	262.881
5	Seluma	270.495	284.599	294.016	303.713
6	Muko Muko	288.004	307.670	321.002	333.767
7	Lebong	269.282	286.581	298.264	308.004
8	Kepahiang	259.131	274.671	285.124	293.731
9	Bengkulu Tengah	270.611	286.493	297.163	308.010
10	Kota Bengkulu	424.132	459.927	468.880	494.825
PROVINSI BENGLUKU		283.252	327.358	356.554	380.029

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

5. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan “alat” dari pembangunan. Tujuan pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati umur yang panjang, sehat, dan menjalankan kehidupannya dengan produktif (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana pembangunan dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks komposit tersebut juga menunjukkan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah (kabupaten terhadap kabupaten lainnya atau provinsi terhadap provinsi lainnya) terhadap wilayah lainnya. IPM metode baru dibentuk dari empat indikator yaitu: Angka Harapan Hidup Saat lahir, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan.

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Se Provinsi Bengkulu 2011 - 2015

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bengkulu Selatan	65.84	66.50.00	66.77	67.61	68.28.00	68.57.00
2	Rejang Lebong	64.19.00	64.92	65.51.00	66.11.00	66.55.00	67.51.00
3	Bengkulu Utara	63.50.00	64.61	65.47.00	66.67	67.27.00	67.46.00
4	Kaur	61.39.00	61.85	62.32.00	63.17.00	63.75	64.47.00
5	Seluma	60.27.00	61.01.00	61.55.00	62.10.00	62.94	63.41.00
6	Mukomuko	62.95	63.71	64.16.00	64.79	65.31.00	65.77
7	Lebong	61.87	62.43.00	62.84	63.15.00	63.90	64.72
8	Kepahiang	62.60	63.44.00	63.86	64.44.00	65.22.00	65.45.00
9	Bengkulu Tengah	61.70	62.54.00	63.12.00	63.71	64.10.00	64.68
10	Kota Bengkulu	74.92	75.31.00	75.71	76.16.00	76.49.00	77.16.00
Provinsi Bengkulu		65.35.00	65.96	66.61	67.50.00	68.06.00	68.59.00

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu



6. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dalam setiap sektor pembangunan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sama seperti IPM, Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu 2010- 2014

No.	Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Bengkulu Selatan	91,71	91,82	92,16	93,60	94,00
2	Rejang Lebong	91,57	92,26	92,43	92,44	92,55
3	Bengkulu Utara	89,87	90,29	90,57	91,09	91,32
4	K a u r	81,63	83,15	84,39	85,34	85,66
5	Seluma	81,33	82,81	83,29	83,51	84,80
6	Muko Muko	82,58	82,95	83,13	83,84	84,25
7	Lebong	89,02	89,83	89,85	90,45	91,11
8	Kepahiang	91,11	92,42	93,73	93,75	94,99
9	Bengkulu Tengah	78,38	78,53	80,54	80,83	84,68
10	Kota Bengkulu	91,48	92,59	93,53	94,34	95,71
Provinsi Bengkulu		88,88	89,47	90,51	90,55	91,02

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang disusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Indikator-indikator itu adalah indeks keterwakilan parlemen, indeks pengambilan keputusan, dan indeks distribusi pendapatan. Nilai indeks bernilai antara 0 – 100 persen. Artinya, bila nilai IDJ semakin tinggi maka perempuan semakin berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya.

Tabel 2.18
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu 2012- 2014

No.	Kabupaten/ Kota	2012	2013	2014
1	Bengkulu Selatan	62,06	63,45	58,63
2	Rejang Lebong	56,69	57,23	57,76
3	Bengkulu Utara	64,38	64,81	65,15
4	K a u r	60,05	60,77	61,69
5	Seluma	58,98	68,56	66,86
6	Muko Muko	54,27	54,21	59,74
7	Lebong	69,50	69,77	77,91
8	Kepahiang	67,70	66,65	77,61
9	Bengkulu Tengah	62,70	64,50	66,22
10	Kota Bengkulu	75,21	75,64	75,97
BENKULU		69,57	73,45	68,76

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu



B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator yang mendukung pembangunan menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembangunan daerah yang fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dapat dilihat dari capaian angka-angka diantaranya angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi angka usia harapan hidup, rasio penduduk yang bekerja serta pengeluaran per kapita penduduk yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pendidikan

Data indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan data yang cukup dinamis, dimana terjadi penurunan namun juga mengalami peningkatan secara signifikan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan ini dipengaruhi oleh terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah yang cukup besar terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Angka Melek Huruf sebagai indikator pembentuk Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan sangat tinggi mencapai angka 96,6 persen dengan angka rata-rata lama sekolah 8,76 tahun.

Tabel 2.19
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Selatan 2011-2015

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melek Huruf (%)	96,51	96,54	96,57	96,9	97,6
2	Angka Rata-rata lama Sekolah	8,24	8,36	8,71	8,75	8,76
3	Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A	108,44	113,4	108,99	116,8	112,97
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/ Paket B	95,45	95,64	83,53	87,3	102,74
5	Angka Partisipasi Kasar SMA/ Paket C	79,86	72,38	90,26	98,1	86,34
6	Angka Pendidikan yang ditamatkan	11,88	12,20	12,78	13,22	13,06
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,27	96,83	98,2	98,4	96,46
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	70,28	72,65	76,37	80,2	89,63
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	62,94	51,54	72,98	78,8	76,55

Sumber : - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Bengkulu Selatan, 2015
- Pengolahan Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) B/S 2015

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditandai oleh peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana indikator pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lainnya adalah idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah, dan rasio guru terhadap sekolah. Angka Melek Huruf telah digunakan sebagai indikator tercapainya Education for All (EFA) dan



MDG's dan berperan penting dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Melek huruf merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses informasi dan pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik. Indikator Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk: 1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD; 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media; 3) menunjukkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan yang mencerminkan perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Capaian dari tahun 2011-2015, menunjukkan terjadi peningkatan angka melek huruf hingga tahun 2015 sebesar 97,6.

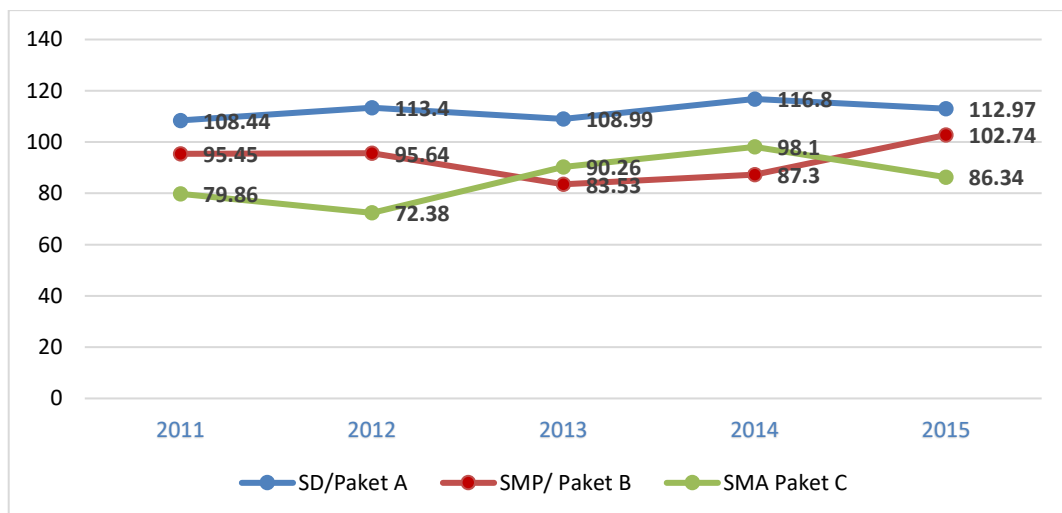
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana 5 tahun terakhir pada tahun 2011 adalah 8,24 tahun, kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 8,36 tahun, Pada tahun 2013 naik lagi menjadi 8,71 kemudian pada tahun 2014 adalah 8,75, Tahun 2015 sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 8,76 tahun. Apabila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, rata-rata keseluruhan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan sudah menduduki kelas 2 SMP dan hal ini berarti sudah melampaui angka 6 tahun (lulus SD).

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Gambar 2.6
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015



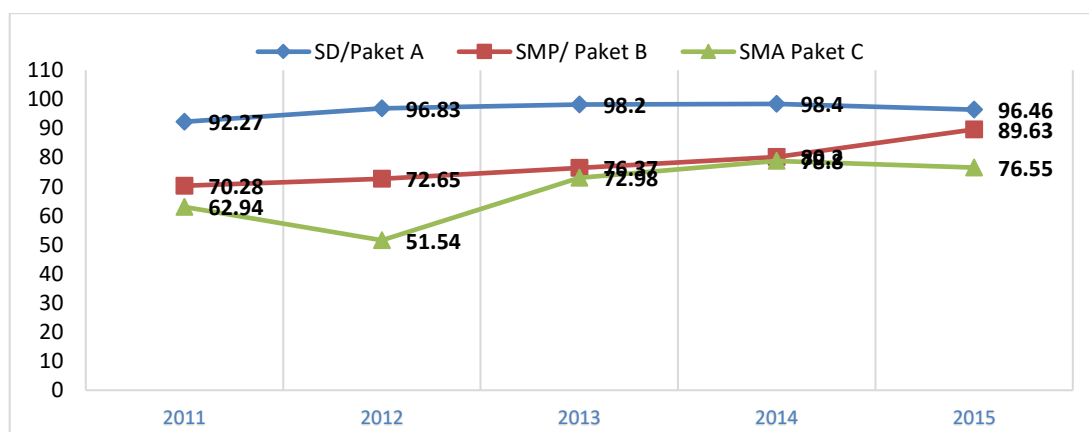


APK SD/MI di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu 2011–2015 mengalami naik turun namun masih di atas 100 persen. Pada tahun 2011 capaian APK SD sebesar 108,44 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 113,4 persen. Capaian APK SD di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015 telah mencapai 112,97 persen. Hal Ini berarti bahwa rasio antara jumlah anak yang bersekolah ditingkat sekolah dasar lebih besar daripada jumlah anak usia, sekolah di tingkat sekolah dasar (7-12 tahun), yaitu selisih 12,97 persen pada tahun 2015. Hal ini bisa diartikan bahwa ada sekitar 12,97 persen anak yang bersekolah di sekolah dasar atau yang setara merupakan anak dibawah atau diatas usia 7-12 tahun. Pada jenjang sekolah yang lebih tinggi (SLTP atau SLTA) angka partisipasi kasar penduduk lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk bekerja atau bahkan pada usia tersebut sudah berstatus kawin sehingga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga. Pada tingkat SMP APK tercatat pada tahun 2015 sebesar 102,74 persen lebih tinggi dibandingkan dengan APK SMA yaitu sebesar 86,34.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Gambar 2.7
Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015



Gambar pada grafik diatas menunjukkan tren APM SD di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami naik turun, pada tahun 2011 mencapai 92,27 persen kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2014, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 96,46 persen. Kondisi yang cukup berbeda terdapat pada pencapaian APM SMP, dimana tahun dari tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2011 APM SMP sebesar 70,28 hingga pada tahun 2015 meningkat menjadi 89,63 persen. Pada APM SMA hampir sama halnya dengan APM SD yang mengalami naik turun dimana pada tahun 2011 sebesar 62,94 Persen kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 menjadi 51,54 persen dan pada tahun berikutnya kembali meningkat hingga pada tahun 2014 menjadi 78,8 Persen tetapi pada tahun 2015 kembali menurun menjadi 76,55 persen.



2. Kesehatan

Tabel 2.20
Jumlah Kelahiran Bayi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2016

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kelahiran Bayi	2.695	3.661	2.846	2.579	3.001	2.753

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

1. Angka Harapan Hidup

Tabel 2.21
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan 2011 - 2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup (AHH) %	67,00	67,03	67,05	67,06	67,16

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program kesehatan maupun penilaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan, diantaranya difokuskan untuk meningkatkan AHH yaitu rata-rata-tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bengkulu Selatan (2011-2015) terus mengalami peningkatan.

2. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Di Kabupaten Bengkulu Selatan masih ditemukan angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Hal ini menjadi sinyal, bahwa Pemerintah Daerah harus lebih proaktif dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi ibu dan bayi yang baru lahir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masih terjadinya kejadian kematian bayi maupun ibu melahirkan, diantaranya masih adanya ibu yang melahirkan dibantu dukun. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menyediakan tenaga kesehatan (bidan) yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang baik sehingga kematian bayi dan ibu melahirkan dapat dicegah.

Tabel 2.22
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2010 -2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AKB	11	20	32	12	7	33	30
AKI	4	1	1	2	3	3	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

Dari tabel diatas angka kematian bayi menunjukkan trend fluktuatif dimana pada tahun 2010 angka kematian bayi sebanyak 11 kasus dan naik menjadi 20 dan 32 kasus pada tahun 2011 dan 2012. Sementara pada tahun 2013 dan 2014 angka kematian bayi kembali turun menjadi 12 dan 7 kasus, kemudian untuk tahun 2015 meningkat lagi menjadi 33 kasus setelah itu di tahun 2016 kembali turun dengan 30 kasus namun angka ini masih cukup tinggi. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan dari tahun 2010 sebanyak 4 Orang menurun pada tahun 2011-2012 sebanyak 1 Orang, Kemudian pada tahun 2013 hingga 2015 meningkat menjadi 3 Orang. Pada tahun 2016



angka kematian ibu menjadi 1 Orang hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan ibu yang mengandung mengenai kesehatan, peralatan kesehatan yang kurang memadai serta wilayah yang terkadang jauh dari fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

3. Persentase Balita Kurang Gizi/Gizi Buruk di Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.23
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2010 - 2016

No	Tahun	Jumlah Balita	Jumlah Balita Dengan Gizi Buruk	Persentase	Ket
1	2010	13.261	17	0,13	-
2	2011	13.450	19	0,14	-
3	2012	13.825	15	0,11	-
4	2013	13.946	11	0,08	-
5	2014	13.712	11	0,08	-
6	2015	13.285	7	0,05	-
7	2016	13.030	9	0,07	-

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kesehatan Tahun 2016

Data dari tahun 2010 sampai tahun 2015 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah balita dengan gizi buruk namun pada tahun 2016 sebesar 0,07 % yaitu sebanyak 9 orang balita. Angka ini walaupun dari tahun-ketahun mengalami penurunan tetapi Balita Gizi Buruk masih tetap ada.

3. Ketenagakerjaan

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Jika seseorang bekerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu maka mereka disebut setengah penganggur. Tabel berikut menunjukkan bahwa sekitar 67,52 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja memiliki pekerjaan atau bekerja. Dari seluruh penduduk yang bekerja sekitar 57 persen bekerja di sektor pertanian, 18 persen bekerja di sektor jasa, dan 25 persen sektor lainnya.

Tabel 2.24
Penduduk 15 Tahun Keatas Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2011 - 2015

No	Jenis Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angkatan Kerja	74.278	69.170	68.053	74.110	76.738
2	Bekerja (%)	72.710 (73,78)	66.449 (67,65)	65.207 (66,65)	71.698 (66,84)	73.563 (67,52)
3	Pengangguran	1.568	2.721	2.846	2.412	3.175
4	Bukan Angkatan Kerja	26.402	32.695	34.052	33.158	32.204
	Jumlah	100.680	101.865	102.105	107.268	108.942

Sumber : Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Provinsi Bengkulu

Pengangguran di Kabupaten Bengkulu Selatan jumlahnya masih cukup tinggi. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan akses yang luas bagi para



tenaga kerja yang masih produktif untuk bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan, guna menunjang kehidupannya. Adapun Jumlah pengangguran di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2.25
Jumlah Pengangguran Terbuka Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Pengangguran Terbuka		Jumlah
	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Belanja	
2015	1.131	2.044	3.175
2014	578	1.834	2.412
2013	1.069	1.777	2.846
2012	977	1.744	2.721
2011	979	589	1.568

Sumber : Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Provinsi Bengkulu

Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkulu selatan pada tahun 2015 sebanyak 3.175 orang meningkat jika dibandingkan tahun 2011 sebanyak 1.568 orang. Pengangguran yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan selain disebabkan pengangguran struktural, juga disebabkan oleh pengangguran musiman, yaitu mereka yang bekerja karena perubahan atau penggantian musim. Sebagai contoh, jika cuaca baik maka nelayan melaut, jika cuaca buruk maka nelayan berhenti mencari ikan. Termasuk didalamnya adalah kejadian pada musim paceklik atau kering. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya jam kerja normal selama seminggu. Mereka digolongkan sebagai setengah penganggur dan rentan menjadi pengangguran. Diperkirakan sekitar 50 persen penduduk yang bekerja di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki jam kerja kurang dari 35 jam seminggu.

4. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan Seni Budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat menjadi salah satu sumber potensi pendapatan daerah Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat, karena Seni Budaya merupakan sebuah produk yang memiliki nilai jual untuk mendukung program prioritas Pemerintah Daerah dalam sektor kepariwisataan. Untuk itu, pembinaan Kelompok Pelaku Seni Budaya perlu dilakukan dengan serius dan pengembangan seni budaya harus didukung penuh dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten.

Kepemudaan dan olahraga pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui penyelenggaraan upacara bendera dan kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan lomba gerak jalan, kegiatan senam kesegaran jasmani bagi SMP dan SMA, dan penyelenggaraan gerak jalan santai.



2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Umum merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pelayanan umum lebih menentukan keberhasilan pelaksana pembangunan terutama pelayanan umum yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu aspek pelayanan umum sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari para pelaksana pembangunan. Indikator aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

a. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diharapkan, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Daerah, demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Tabel 2.25 memberikan gambaran capaian pembangunan bidang pendidikan, yang akan terus ditingkatkan kualitasnya.

Tabel 2.26
Data Fokus Pendidikan Tahun 2011 - 2016

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pendidikan Dasar							
1	Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI)	99,49	99,37	99,90	99,95*	83,26	84,62
2	Angka Partisipasi Sekolah (SMP/MTs)	90,84	95,48	95,86	96,12*	97,87	94,09
3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	68,97	68,10	67,31	66,91	59,00	58,00
4	Rasio Guru/Murid	836,78	945,87	874,76	871,19	909,00	923,00
Pendidikan Menengah							
1	Angka Partisipasi Sekolah	74,90	73,09	76,20	76,30*	92,59	91,54
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	31,22	30,84	31,71	31,35	30,00	27,00
3	Rasio Guru/Murid	875,83	917,53	1202,09	856,00	1381,0	1780,0
4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	96,51	96,54	96,57	96,90*	95,22	98,89
Fasilitas Pendidikan							
1	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	65,38	65,38	61,81	56,50	63,81	65,38



No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	72,96	67,76	67,76	79,29	79,29	80,20
Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1	Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3,849	3,849	3,582	3,771	4,176	6,479
Angka Putus Sekolah							
1	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,38	0,00	0,27	0,44	0,02	0,02
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,03	0,02	0,04	1,18	0,06	0,06
Angka Kelulusan							
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97,34	99,00	99,93	100	93,13	99,18
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	93,14	95,36	92,77	97,97	65,06	99,13
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	93,99	94,80	92,77	99,00	99,86	99,86
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,34	97,16	97,67	106,53	94,60	107,57
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	102,14	129,31	101,12	96,21	101,82
6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	64,31	70,59	70,50	77,00	61,07	61,07

Sumber : Pengolahan Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, 2016

b. Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan menjadi kebutuhan dan mutlak dipenuhi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan dalam bidang kesehatan adalah baiknya layanan kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.27
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011 - 2015

No	Fasilitas Kesehatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	RSU	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	14	14	14	14	14
3	Puskesmas Pembantu	41	41	41	41	41
4	Rumah Bersalin	2	2	2	2	2
5	Apotik	14	18	18	18	18
6	Toko Obat Berizin	3	3	3	3	2
7	Posyandu	190	191	191	191	190

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2016

Ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Bengkulu Selatan yang diiringi dengan pemerataan tenaga medis pada fasilitas-fasilitas layanan kesehatan, harus mendapatkan



perhatian serius dari Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat.

Tabel 2.28
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011 - 2015

No	Tenaga Medis	2011	2012	2013	2014	2015
1	Dokter Umum	43	25	27	39	46
2	Dokter Gigi	6	5	3	4	6
3	Dokter Spesialis	5	4	1	6	4
4	Bidan	235	328	328	335	344

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2016

c. Transportasi

Dalam rangka mendukung tercapainya konektivitas jaringan khususnya dalam hal ketersediaan sarana prasarana transportasi, perlu terus dikembangkan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan keterisolasian serta membuka akses hubungan dengan daerah lain, sehingga memberikan *value added* menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sarana transportasi darat yaitu ketersediaan jaringan jalan menjadi sarana transportasi utama di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan penggunaan moda angkutan jalan, sedangkan transportasi udara dan air belum tersedia. Namun sarana prasarana infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum memadai dan memerlukan penanganan segera dikarenakan kondisi jalan sudah banyak yang rusak. Hal ini perlu mendapatkan perhatian baik itu dari Pemerintah untuk jalan-jalan nasional, Jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi serta jalan-jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri.

Berikut data jalan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan kewenangan pemeliharannya:

Tabel 2.29
Status Jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011-2015

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Nasional	97,58	110,477	110,47	110,477	110,477
2	Provinsi	123,10	123,10	125,60	128,80	128,800
3	Kabupaten	656,29	689,53	728,23	773,510	1.104,690
	Total	876,97	923,107	964,30	1,012,787	1.343,937

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2016

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Bidang pertanian menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, mengingat di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi di bidang pertanian yang cukup menjanjikan dan memiliki prospek yang baik apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik.



Tabel 2.30
Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang
di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Produksi (Ton)		
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jumlah
1	Manna	4.086	-	4.086
2	Bunga Mas	5.895	3	5.898
3	Kota Manna	1.899	-	1.899
4	Pasar Manna	1.186	-	1.186
5	Kedurang	12.687	-	12.687
6	Kedurang Ilir	4.970	125	5.095
7	Seginim	16.630	-	16.630
8	Air Nipis	16.777	-	16.777
9	Pino	8.846	-	8.846
10	Ulu Manna	3.699	18	3.717
11	Pino Raya	11.378	463	11.841
	Jumlah/2015*	88.053	609	88.662
	2014	87.393	705	88.098
	2013	70.537	741	71.278
	2012	77.102	1.385	78.486
	2011	65.386	1.255	66.641

*) Angka sementara Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2016

b. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah pesisir yang langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah barat. Kondisi ini memberikan dukungan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat karena menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Potensi perikanan sangat besar baik itu perikanan laut maupun perikanan darat. Sumbangan terhadap PDRB ditunjukkan dengan jumlah produksi perikanan baik perikanan laut maupun perikanan darat yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.31
Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	
		Perikanan Laut	Perikanan Darat
1	Manna	41,38	102
2	Bunga Mas	43,20	8
3	Kota Manna	29,30	386
4	Pasar Manna	1.206,65	180
5	Kedurang	-	3.231
6	Kedurang Ilir	98,28	1.387
7	Seginim	-	4.709
8	Air Nipis	-	5.789
9	Pino	-	512
10	Ulu Manna	-	283
11	Pino Raya	140,82	198
	Jumlah/2015	1.559,63	16.885
	2014	1.774,25	5.384,21



No	Kecamatan	Produksi (Ton)	
		Perikanan Laut	Perikanan Darat
	2013	1.222,25	6,520,12
	2012	1.088,42	5.384,21
	2011	1.189,82	4.128,01

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2016

c. Perkebunan

Perkebunan juga menjadi salah satu sub sektor penyumbang PDRB yang cukup besar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan relatif merata dan menyebar di seluruh wilayah kabupaten, dengan jenis tanaman yang bervariasi. Tanaman perkebunan yang menjadi komoditi unggulan adalah kelapa sawit kemudian diikuti dengan komoditi lain seperti karet, kopi, coklat dan kelapa. Selain itu terdapat juga komoditas lain yang juga diusahakan oleh rakyat namun jumlahnya relatif kecil diantaranya lada, kayu manis, cengkeh, kemiri, pinang, aren, kapuk, nilam dan jahe.

Lokasi perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan tersebar di masing-masing kecamatan, dimana pada masing-masing kecamatan memiliki perkebunan yang luasnya bervariasi.

Tabel 2.32
Luas Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan

Kecamatan	Jenis Tanaman Perkebunan (Ha)						
	Kopi	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Cengkeh	Lada	Coklat
Manna	68	119,5	133	1.433	1	-	67
Bunga Mas	12	701	61	1.566	-	-	75
Kota Manna	7	110	45	705,3	1,95	-	91
Pasar Manna	4	12	23,5	134	1	-	9
Kedurang	789	469	101,55	563	16,5	-	198
Kedurang Ilir	99	1.066	38,05	1.624	5,1	-	53
Seginim	130	145	133	279	0,5	1,5	90
Air Nipis	629	137	103,5	445,5	-	-	141,50
Pino	75	487,5	50	1.222,07	6	5	215
Ulu Manna	66	927	84	927	-	13	183
Pino Raya	227	463,5	181	5.377,5	4	5,5	211
Jumlah/2015	2.700	4.637,5	953,60	14.276,37	36,05	25	1.333,5
2014	2.671	4.654,5	951,6	14.092,37	34,65	25	1.421,50
2013	2.716,5	4.608	951	13.729,87	27,7	28,2	1.473
2012	2.847	4.605	928,5	13.594,1	25,20	37,2	1.473
2011	2.965	4.585	1.024	13.806,3	46,55	253,5	1.578,5

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dengan tetap terbuka pada persaingan dan perubahan yang ada.

1. Fokus kemampuan ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersentuhan langsung dengan aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Beberapa faktor yang



mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah antara lain ; angka konsumsi RT per kapita, persentase konsumsi RT untuk non pangan, produktivitas 9 sektor PDRB, pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, serta jasa-jasa.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olah raga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bengkulu Selatan dilalui oleh jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Kaur yang merupakan jalan lintas barat. Adapun rincian jalan berdasarkan permukaan pada tahun 2015 yaitu:

Tabel 2.33
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Pemerintahan yang Berwenang di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015

No	Jenis Permukaan	Jalan (Km)			
		Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
1	Hotmix/Lapen (Lapisan Penetrasi)	110,447	128,800	410,510	649,757
2	Koral	-	-	331,500	331,500
3	Tanah	-	-	362,680	362,680
Jumlah/2015		110,447	128,800	1.104,690	1.343,937
2014		110,447	128,80	773,510	1.011,757
2013		110,447	125,60	728,230	964,352
2012		110,447	123,10	689,53	923,107
2011		97,58	123,10	656,29	876,97

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

Terkait dengan penyediaan infrastruktur tersebut permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur pertanian dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur pertanian (jalan sentra produksi dan irigasi) merupakan prasarana penting dalam mendukung pembangunan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan sedangkan pembangunan jaringan jalan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar distribusi barang antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan, jaringan jalan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus produksi maupun pemasaran hasil. Adapun data jalan menurut kondisi dan kelas jalan sebagai berikut :



Tabel 2.34
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kelas Jalan
di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 - 2015 (Km)

Kondisi dan Kelas Jalan	Tahun		
	2013	2014	2015
Kondisi Jalan			
Baik	663,765	672,218	578,470
Sedang	64,465	84,072	8,300
Rusak	-	6,400	86,610
Rusak Berat	-	10,820	431,310
Kelas Jalan			
I	27,000	27,000	-
II	0,665	0,665	-
III	0,835	0,835	-
III A	-	-	-
III B	244,320	244,320	-
III C	119,700	138,700	761,820
Tidak Dirinci/Lannya	335,710	361,990	342,870
Jumlah	728,230	773,510	1.104,690

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator yang berkaitan erat dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu angka kriminalitas.

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.35
Angka Kriminalitas di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jenis Kriminalitas	Angka Kriminalitas				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kasus Narkoba	6	6	7	10	13
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	2	2	2	1	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	3	2	3	2	2
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	29	-	38	38	-
5.	Jumlah kasus Pencurian	123	150	82	86	64
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	282	329	349	352	122
9.	Jumlah Penduduk	145.153	146.891	148.854	150.601	152.194
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,00194	0,00224	0,0023	0,0023	0,0002

Sumber: Pengolahan Data Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2016

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan masih harus dilakukan evaluasi untuk bisa mengatakan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Secara singkat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dapat dijabarkan sebagai berikut:



1. Bidang Pendidikan

Pembangunan pada bidang pendidikan dapat dikatakan sudah cukup menunjukkan perkembangan yang baik meskipun perlu mendapatkan perbaikan dan peningkatan kualitas yang lebih baik lagi. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan bidang Pendidikan telah mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan sekolah menengah. Kondisi ini menjadi pendorong meningkatnya capaian persentase penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis sebesar 97,60 persen, dengan rata-rata lama lama sekolah 8,75 tahun. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP.

Beberapa indikator pendidikan lainnya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2014 APS untuk penduduk usia 7-12 tahun mencapai 99,85 persen, yang berarti bahwa 99,95 persen penduduk usia 7-12 tahun bersekolah. Untuk penduduk usia 13-15 tahun sekitar 96,812 persen yang bersekolah dan kelompok penduduk usia 16-18 tahun hanya 76,30 persen yang bersekolah.

APK Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2014 untuk SD sederajat sebesar 116,8 persen artinya masih ada murid SD sederajat yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM menjelaskan banyaknya murid pada usia sekolah tertentu terhadap tingkat pendidikannya. APM tahun 2014 untuk tingkat SD sederajat sebesar 98,40 persen artinya sekitar 98 persen penduduk usia 7-12 tahun bersekolah di tingkat SD sederajat, sedangkan 2 persen lagi belum/tidak bersekolah di SD sederajat atau sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

2. Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan pada upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas sarana prasarana serta layanan kesehatan. Selain itu juga diupayakan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan, juga melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit di masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan telah menunjukkan progress yang signifikan, dimana salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yaitu angka harapan hidup.

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015 hampir sama keadaannya pada tahun sebelumnya. Untuk toko obat berizin menjadi 2 unit dan posyandu juga menurun menjadi 190 unit.

Jumlah tenaga kesehatan meningkat dibanding tahun sebelumnya dari 826 orang menjadi 1054 orang pada tahun 2015. Rinciannya adalah 4 orang dokter spesialis, 46 orang dokter umum, 6 orang dokter gigi, 344 orang bidan dan 654 orang tenaga kesehatan lainnya.

Penolong kelahiran (terakhir) di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2016 umumnya adalah bidan/ bidan atau tenaga kesehatan lainnya yaitu sekitar 99,23 persen dari total seluruh kelahiran, selanjutnya persalinan ditolong non tenaga kesehatan sebesar 0,77 persen.

Dalam rangka menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sebagai upaya mendukung pencapaian *millennium development goals* (MDGs), maka kedepannya perlu ditingkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar melakukan persalinan dengan penolong kelahiran tenaga kesehatan.



3. Bidang Pekerjaan Umum

Pembangunan bidang pekerjaan umum belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan masih banyak infrastruktur terutama jalan-jalan kabupaten yang notabene menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri masih banyak yang perlu diperbaiki. Disamping itu juga jalan-jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga sudah banyak mengalami kerusakan. Pembangunan infrastruktur dasar yang juga menjadi kebutuhan mendesak masyarakat yaitu jalan sentra produksi serta irigasi perlu mendapatkan perhatian agar dapat ditingkatkan pembangunan maupun pemeliharaannya dengan memperhatikan standar dan kualitas yang baik.

Pada saat yang sama juga perlu dilakukan pembangunan jalan di desa-desa terpencil dan terisolir agar mobilitas masyarakat terutama arus hasil produksi dapat berjalan lancar, sehingga dapat memberikan nilai tambah. Disamping itu infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah dengan daerah lain perlu dilakukan pemeliharaan dan pembangunan untuk mendukung terjalannya interkoneksi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4. Bidang Pertanian

Bidang pertanian adalah sektor penyumbang terbesar PDRB serta menjadi program prioritas Pemerintah Daerah. Namun pembangunan di bidang pertanian masih belum memberikan solusi konkret terhadap rencana prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021. Banyaknya permasalahan yang muncul menjadi pertanda bahwa pembangunan bidang pertanian belum berjalan maksimal, diantaranya masih maraknya alih fungsi lahan, jaringan irigasi yang tidak memadai serta kurangnya ketersediaan pupuk bagi masyarakat.

Dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menuju Bengkulu Selatan “Emas”, perlu dilakukan revitalisasi program prioritas sektor pertanian dengan kegiatan riil dengan dukungan perencanaan dan penganggaran yang memadai untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan masyarakat sejahtera.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.36
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2017
Kabupaten Bengkulu Selatan



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah permasalahan-permasalahan yang muncul dan mempengaruhi capaian keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah berhubungan dengan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan terutama OPD terkait dengan layanan dasar dan tugas fungsi OPD.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pembangunan daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan menemui beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusi terbaiknya, sehingga permasalahan-permasalahan daerah tersebut tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah ke depannya.

Beberapa permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain :

1. Tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada tahun 2015 mencapai angka 22,76 % dan merupakan angka kemiskinan tertinggi ketiga diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu setelah Kabupaten Seluma dan Kaur. Perlu dilakukan strategi pengurangan Kemiskinan (**Propour**) untuk menekan angka kemiskinan di Bengkulu Selatan dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna menurunkan angka pengangguran (**Projob**) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan adanya strategi pengurangan kemiskinan dan kebijakan menekan angka kemiskinan maka dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian (**Progrowth**).
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Disamping itu peningkatan kualitas serta pemerataan tenaga pengajar masih harus dilakukan. Perluasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan perlu ditingkatkan sehingga pembangunan bidang pendidikan bisa menjangkau semua demi memenuhi amanat Inpres 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan.
3. Masih rendahnya Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang dapat mendukung meningkatnya pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Maka perlu dilakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan cara Pendataan ulang objek-objek pajak maupun objek retribusi yang ada.
4. Kurangnya tenaga kesehatan baik tenaga medis, dokter umum maupun dokter spesialis serta kurang memadainya kualitas sarana-prasarana kesehatan. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana kesehatan yang memadai serta penyediaan tenaga kesehatan berkualitas yang cukup.
5. Masih rendahnya investasi yang masuk ke Kabupaten Bengkulu Selatan terutama yang bergerak pada sektor-sektor potensial penyumbang PDRB. Sampai saat ini baru sektor pertanian dengan sub sektor perkebunan yang mampu menarik investor untuk mengelola dan mengembangkan potensi sektor perkebunan tersebut, dimana telah berdiri 2 (dua) perusahaan pengolahan kelapa sawit (CPO). Namun sektor-sektor potensial lainnya seperti pariwisata, pertambangan, perdagangan dan jasa masih membutuhkan pengembangan, Khususnya sektor Pariwisata masih belum optimal dalam pengelolaannya pengembangan potensi pariwisata diharapkan dapat mendorong meningkatnya investasi dibidang Kepariwisata.



6. Masih terbatasnya serta rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Selatan. Banyak ruas jalan baik yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten yang telah mengalami kerusakan sehingga menghambat arus transportasi.
7. Masih rendahnya pengelolaan infrastruktur dasar lainnya terutama di bidang pertanian dan perkebunana yaitu jalan sentra produksi dan irigasi pertanian kurang memadai sehingga menghambat distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian.



2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan

Tabel 2.37
Identifikasi Permasalahan Pembangunan

No	Isu Strategis		
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Belum optimalnya penerapan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>)	Hukum Dan Aparatur
	1. Birokrasi yang ada belum sepenuhnya bersih dan akuntabel		Sub Bidang Aparatur
	2. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah		<ul style="list-style-type: none"> • Birokrasi yang bersih dan akuntabel; • Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
	3. Manajemen pembangunan di daerah belum berjalan secara optimal		<ul style="list-style-type: none"> • Birokrasi yang efektif dan efisien;
4.	4. Birokrasi belum efektif dan efisien		
2.	Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan APBD	Belum optimalnya sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik	Ekonomi Reformasi Keuangan Negara <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penerimaan negara; • Peningkatan kualitas belanja negara melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun daerah.
3.	Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Layanan Dasar	Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Layanan Dasar	Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama
	1. Pendidikan	1. Bidang Pendidikan	Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas; • Peningkatan kualitas pembelajaran; • Peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; • Peningkatan akses dan kualitas PAUD; • Penguatan tata kelola pendidikan.



No	Isu Strategis		
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional
	2. Kesehatan	2. Kesehatan	<p>Kesehatan dan Gizi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; • Percepatan perbaikan status gizi masyarakat; • Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; • Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; • Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan; • Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan; • Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; • Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan; • Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan; • Pengembangan jaminan kesehatan nasional
	3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Keunggulan Lokal	3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Keunggulan Lokal	<p>Ekonomi</p> <p>Peningkatan Ekonomi Kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula diekonomi kreatif;
4.	Rendahnya Kapasitas Infrastruktur Dasar	Rendahnya Kapasitas Infrastruktur Dasar	<p>Penyediaan Sarana Dan Prasarana</p> <p>Infrastruktur, Kependudukan, dan Urbanisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan massal yang murah



No	Isu Strategis		
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional
			<p>dan nyaman, terutama masyarakat perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur terbentuk dengan permasalahan ketersediaan lahan yang berkompetisi dengan sektor-sektor lain termasuk properti (perumahan dan permukiman); • Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman; serta • Belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya listrik.
5.		Rendahnya daya saing dan iklim investasi daerah	
6		Belum terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa	
7.	Tingginya Angka Kemiskinan Dan Pengangguran	Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketertinggalan	
8..	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan	Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	<p>Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi</p> <p>Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun nir-hayati;
9.		Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing	
		1. Rendahnya kapasitas Pelabuhan Pulau Baai	
		2. Rendahnya Kapasitas Bandara udara Fatmawati	



No	Isu Strategis		
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional
		3. Belum Optimalnya Infrastrukur Kelistrikan	
		4. Rendahnya konektivitas akses Lintas Provinsi	
10	Belum Optimalnya Pengelolaan Kepariwisata	Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan	<p>Ekonomi</p> <p>Peningkatan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata;
11.		Belum optimalnya pembangunan kemaritiman yang integratif, berdaya saing dan berkelanjutan	
12.	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama</p> <p>Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; <p>Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal; Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; Peningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.
13.	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup



No	Isu Strategis		
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan; • Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani; • Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasaran hasil perikanan/petambak garam; • Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; • Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan; • Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS; • Penguatan pasokan, bauran dan efisiensi konsumsi energi; • Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; • Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI; • Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; dan • Penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan
14.	Rendahnya Peningkatan Daya Saing Kepemudaan Dan Keolahragaan	Rendahnya Peningkatan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama Pemuda dan Olahraga



No	Isu Strategis		
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan; • Peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
15.	Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi (UKMK)	Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)	<p>Ekonomi</p> <p>Pemberdayaan UMKM dan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%), dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah; • Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah (kurang dari 19,0%) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan; • Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.
16.	Minimnya Infrastruktur dibidang Informasi Dan Telematika	Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika	<p>Ekonomi</p> <p>Data dan Informasi Statistik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan data dan informasi akibat pemekaran daerah dan desentralisasi; • Meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga; • Koordinasi antar instansi masih kurang; • Kurangnya jumlah SDM statistik yang profesional; • Beragamnya jenis pengguna data memerlukan perlakuan khusus pada masing-masing pengguna; • Keterbatasan pada ketersediaan dan penggunaan sistem TIK.



No	Isu Strategis		
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional
17.	Belum Optimalnya Kehidupan Berdemokrasi, Pengembangan Budaya Daerah Dan Penerapan Nilai - Nilai Agama.	Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi, pengembangan budaya daerah dan penerapan nilai-nilai agama	<p>Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama</p> <p>Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan karakter dan jati diri bangsa; • Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; • Pelestarian warisan budaya; • Peningkatan promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya; dan • Pengembangan sumber daya kebudayaan. <p>Agama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; • Peningkatan kerukunan umat beragama; • Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; • Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; • Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

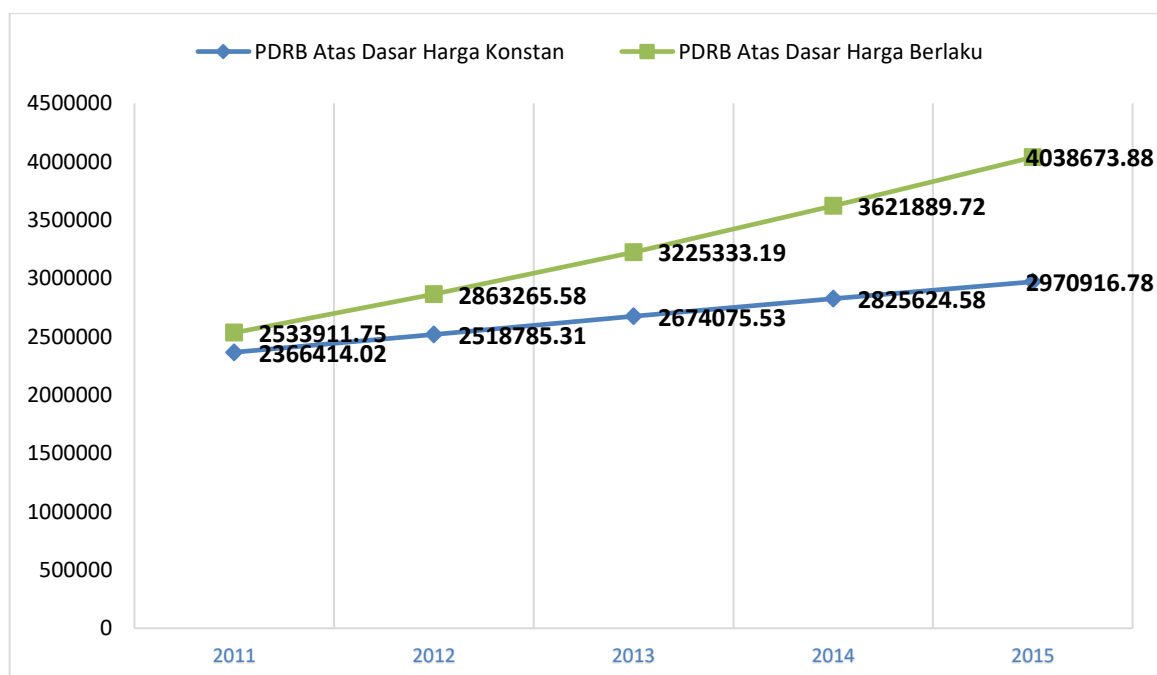
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu harus dibangun pondasi yang kuat sehingga tercipta kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memungkinkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (*Pro-Growth*) yang dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui: (1) menekan angka kemiskinan (*Pro-Poor*); (2) menurunkan tingkat kemiskinan (*Pro-Job*); dan (3) memperkuat kebijakan yang berwawasan lingkungan (*Pro-Environment*) untuk mendukung pengembangan program ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan ke depan masih bertumpu pada sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDRB masih sangat dominan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian di suatu daerah. Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2009-2013, kinerja perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Gambar 3.1
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)



Sumber: Pengolahan Data BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016



Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi diantaranya adalah melaksanakan revitalisasi pertanian terutama perkebunan, pengembangan produksi perikanan dan peningkatan pengelolaan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan irigasi) terutama jalan-jalan sentra produksi pertanian. Disamping itu juga dilakukan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik investor, memberikan jaminan kemudahan berusaha dan berinvestasi serta pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

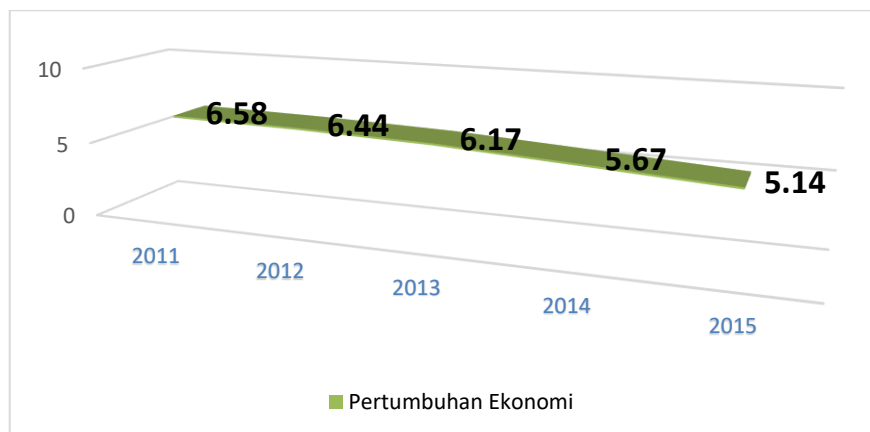
1) Kondisi Ekonomi Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian daerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi nasional. Secara makro kondisi ekonomi tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun krisis ekonomi di Eropa masih dikhawatirkan akan memberikan pengaruh yang kurang baik.

Perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015 sebesar 5,14 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami peningkatan perekonomian sebesar 5,14 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sedikit melambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,67 persen.

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015 sebesar 5,67 persen didorong oleh pertumbuhan sektor-sektor pembentuknya. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya di tahun 2015 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan minum tahun 2015 sebesar 9,07 persen. Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan minum pada tahun 2014 yang tumbuh lebih cepat yaitu sebesar 9,56 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2015 didukung oleh adanya berkembangnya dan bertambah usaha restoran dan penyediaan



makan minum. Selain itu didukung juga dengan adanya pembangunan rumah toko (ruko) yang mulai menjamur di Kabupaten Bengkulu Selatan

Sektor kedua yang mengalami pertumbuhan terbesar kedua setelah sektor penyediaan akomodasi makan minum yaitu sektor jasa-jasa. Sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan sebesar 9,04 persen di tahun 2015. Pertumbuhan sektor jasa-jasa tahun 2015 lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,86 persen. Pertumbuhan sektor jasa-jasa didukung oleh pertumbuhan sub-sektor pemerintahan umum dan swasta. Jasa swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Sub-sektor pemerintahan umum tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 8,66 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,87 persen. Sub-sektor jasa swasta tahun 2015 mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sub-sektor pemerintahan umum. Sub-sektor jasa swasta tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 8,68 persen.

Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 6,81 persen di tahun 2015. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2015 lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2014 yang sebesar 7,35 persen. Pertumbuhan sektor ini didukung oleh pertumbuhan sub-sektor pembentuknya. Subsektor yang tercakup dalam sektor pengangkutan dan komunikasi adalah subsektor pengangkutan dan subsektor komunikasi. Untuk subsektor pengangkutan, kegiatan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya dari angkutan jalan raya dan jasa penunjang angkutan saja. Sub-sektor pengangkutan tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,78 persen. Kegiatan angkutan darat tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,87 persen, lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 7,08 persen. Kegiatan angkutan jalan raya mengalami trend positif seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik beroda dua maupun beroda empat yang digunakan untuk pengangkutan barang maupun penumpang apalagi hal itu dipermudah dengan sistim pembayaran kredit. Kegiatan jasa penunjang angkutan tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 5,69 persen, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 7,07 persen. Sub-sektor komunikasi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana laju pertumbuhannya sebesar 6,85 persen dibandingkan tahun 2014 laju pertumbuhannya 7,63 persen.

Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 6,31 persen di tahun 2015 lebih lambat sedikit dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,79 persen. Sub-sektor keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 3,15 persen lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,05 persen. Sub-sektor realestat tumbuh sebesar 8,13 persen, dan jasa perusahaan meningkat sebesar 8,68 persen.

Sektor industri pengolahan tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 8,23 persen. Pertumbuhan sektor industri tahun 2014 lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,79 persen. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya bersumber dari subsektor industri bukan migas. Pertumbuhan sub-sektor industri bukan migas paling besar berada pada kelompok komoditi industri makanan dan minuman yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,50 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan ini lebih lambat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 10,23 persen kemudian di ikuti pada sub-sektor industri barang galian bukan logam dengan pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 6,90 persen lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 6,39 persen.



Sektor berikutnya adalah sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 2,19 persen di tahun 2015. Pertumbuhan ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 2,41 persen. Sektor pertambangan dan penggalian ini hanya bersumber dari subsektor penggalian, seperti misalnya usaha penggalian batu, pasir, dan batu hias di pantai ataupun di sungai.

Sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 1,87 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan sektor pertanian tahun 2014 ini lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 3,49 persen. Seluruh Sub-sektor pada sektor Sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan lebih lambat dari pada tahun sebelumnya. Pada sub sektor-Pertanian pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar lebih lambat dibanding tahun lalu yaitu sebesar 1,94 persen bandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,94 persen. Sub-sektor kehutanan mengalami pertumbuhan sebesar -1,28 persen, dan sub-sektor perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 1,94 persen.

Sektor perdagangan besar dan enceran mengalami pertumbuhan sebesar 8,00 persen pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, sektor perdagangan besar dan enceran mengalami pertumbuhan sebesar 7,47 persen. Sub-sektor perdagangan mobil mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan sub-sektor perdagangan besar dan enceran mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

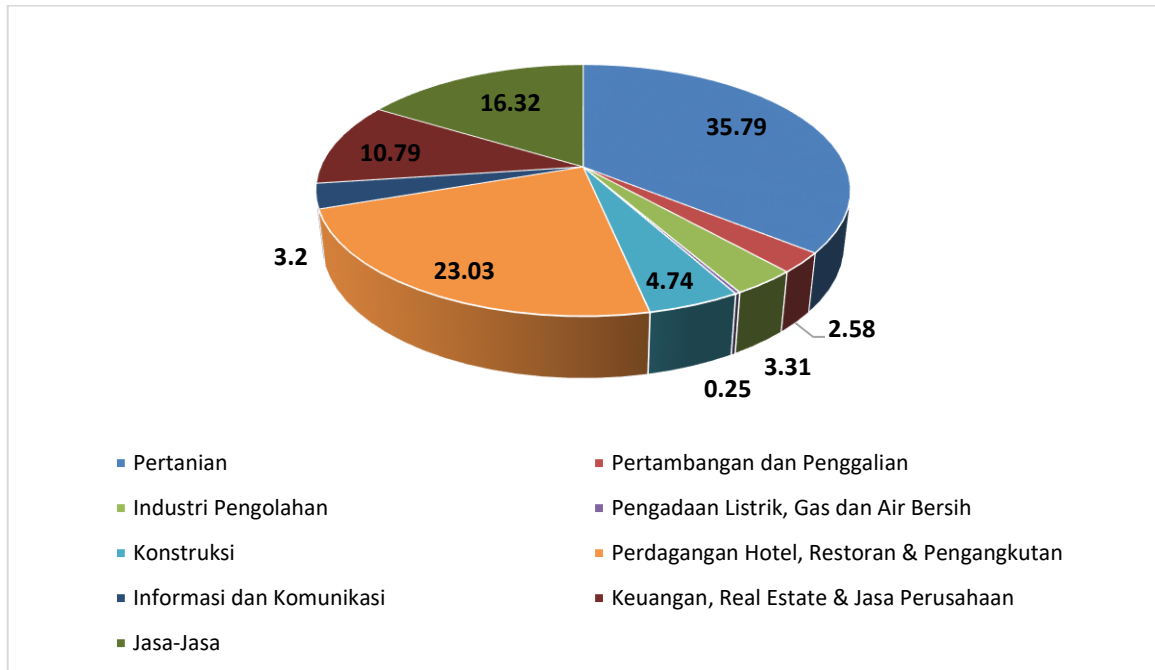
Sektor Konstruksi pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 4,03 persen, pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 pertumbuhan pada sektor konstruksi mengalami pertumbuhan 6,33 persen.

Sektor listrik, gas, dan air bersih merupakan sektor yang paling lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami pertumbuhan sebesar - 4,75 persen pada tahun 2015. Sektor ini bersumber dari subsektor listrik, pengadaan gas, produksi es dan subsektor air bersih karena subsektor gas kota tidak tersedia di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih pada tahun 2015 sangat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,39 persen.

Pergerakan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Selatan dipengaruhi oleh peranan sektor-sektor ekonomi yang ada, sehingga terbentuklah struktur ekonomi. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini juga menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonominya. Berikut ini peranan sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015.



Gambar 3.3
Peran Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015



Sumber: Pengolahan Data BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu 2000 - 2015 hanya mengalami sedikit perubahan. Pada tahun 2015, struktur ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan masih berbasis pada sektor pertanian, kemudian urutan kedua disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran, urutan ketiga sektor jasa-jasa. Ketiga sektor ini memiliki peran 75,14 persen terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan 24,66 persennya tersebar di sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor konstruksi, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor listrik, gas, dan air bersih.

Sektor pertanian memiliki peranan yang paling tinggi dalam menciptakan nilai tambah perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebesar 35,79 persen. Walaupun sektor pertanian memiliki peranan yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan tetapi sektor ini memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah dan masih didominasi oleh tenaga kerja tidak dibayar/ pekerja keluarga. Menurut Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2015 sektor pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 57,05 persen. Pemerintah patut memberikan perhatian yang serius dalam meningkatkan produktivitas di sektor pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Peranan sektor pertanian dari tahun ke tahun sedikit mengalami penurunan. Peranan sektor pertanian dari tahun 2011 - 2015 berturut turut sebesar 38,57 persen, 38,31 persen, 37,71 persen, 36,94 persen dan 35,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi sedikit pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.

Sektor perdagangan, hotel, restoran dan pengangkutan memiliki peranan tertinggi kedua dalam perekonomian setelah sektor pertanian. Peranan sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015 sebesar 23,03 persen, sedikit lebih besar dibandingkan tahun 2011 sebesar 22,42 persen.



Setelah sektor pertanian dan perdagangan, hotel, restoran dan pengangkutan, sektor berikutnya yang memiliki peranan tertinggi yaitu sektor jasa-jasa. Peranan sektor ini dalam menciptakan nilai tambah perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebesar 16,32 persen. Dalam lima tahun terakhir peranan sektor jasa-jasa yaitu sebesar 15,08 persen di tahun 2011; 15,33 persen di tahun 2012; 15,48 di tahun 2013; 15,8 di tahun 2014 dan 16,32 persen di tahun 2015.

Sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan merupakan sektor keempat terbesar yang berperan dalam menyumbang nilai tambah perekonomian sebesar 10,79 persen pada tahun 2015. Angka ini sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,77 persen.

Sektor konstruksi memiliki peranan menyumbang nilai tambah perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 4,74 persen di tahun 2015. Sektor konstruksi mengalami trend yang positif dalam peningkatan peranannya dari tahun 2011 - 2014 namun mengalami penurunan pada tahun 2015.

Sektor industri pengolahan menyumbang nilai tambah perekonomian tahun 2015 sebesar 3,31 persen. Peranan sektor industri ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peranan sektor industri dari tahun 2011 - 2015 berturut-turut sebesar 2,86 persen, 2,87 persen, 3,10 persen, 3,22 persen dan 3,31 persen.

Sektor informasi dan komunikasi yang merupakan sektor yang berperan dalam menyumbang nilai tambah perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebesar 3,20 persen. Peranan sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,15 persen.

Sektor pertambangan dan penggalan tahun 2015 memiliki peranan sebesar 2,58 persen. Peranan sektor pertambangan dan penggalan tahun 2015 selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Sektor listrik, gas, dan air bersih merupakan sektor yang paling kecil peranannya dalam menyumbang nilai tambah perekonomian pada PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan. Sektor listrik, gas, dan air bersih hanya memiliki peranan sebesar 0,25 persen pada tahun 2015.

Untuk lebih jelasnya, besarnya peranan masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan selama 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Peranan Masing-Masing Sektor terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011-2015 (%)

No	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	38,57	38,31	37,71	36,94	35,79
2.	Pertambangan & Penggalan	2,94	2,88	2,73	2,65	2,58
3.	Industri Pengolahan	2,86	2,87	3,10	3,22	3,31
4.	Listrik, Gas, & Air Bersih	0,29	0,29	0,28	0,27	0,25
5.	Konstruksi	4,70	4,74	4,76	4,79	4,74
6.	Perdag, Hotel, Restoran & Pengangkutan	21,95	21,95	22,03	22,42	23,03
7.	Informasi dan Komunikasi	3,16	3,04	3,09	3,15	3,20
8.	Keu, Real Estat, & Jasa Perusahaan	10,45	10,62	10,82	10,77	10,79
9.	Jasa-jasa	15,08	15,33	15,48	15,8	16,32
	TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Pengolahan Data BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016



2. PRDB Per kapita

PDRB Perkapita atau yang biasa disebut pendapatan perkapita (*per capita income*) adalah pendapatan regional per satu orang penduduk pada suatu wilayah tertentu. Seringkali PDRB perkapita dianggap cerminan akan tingkat kemakmuran suatu wilayah. Sebenarnya, PDRB tidak dapat mencerminkan pemerataan pendapatan dari kue ekonomi yang dihasilkan di suatu wilayah karena pendapatan dari usaha/perusahaan yang pemiliknya berasal dari daerah lain akan mengirimkan pendapatan tersebut ke luar wilayah. Sebaliknya, penduduk wilayah tersebut yang menanamkan modalnya di wilayah lain akan memperoleh pendapatan yang dikirim masuk ke wilayah tersebut. Mengingat penyusunan neraca yang menggambarkan transaksi arus pendapatan antar wilayah masih sulit dilakukan maka PDRB perkapita dianggap sebagai konsep yang paling mendekati untuk menggambarkan aspek kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Uraian ringkas PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Lapangan Usaha tahun 2010–2015 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 - 2015

No.	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	2.220,325	2.533,912	2.863,266	3.225,333	3.621,889	4.038,674
B	PDRB harga Konstan (Milyar Rp)	2.220,325	2.366,414	2.518,785	2.674,076	2.825,625	2.970,917
C	Jumlah Penduduk Pertengahan tahun (Jiwa)	143.417	145.267	147.106	148.854	150.601	152.194
D	PDRB Perkapita Harga berlaku (Juta Rp)	15,48	17,44	19,46	21,67	24,05	26,54
E	PDRB Perkapita Harga Konstan (Juta Rp)	15,48	16,29	17,12	17,96	18,76	19,52

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Lapangan Usaha 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dari Rp. 15,48 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 26,54 juta pada tahun 2015. Artinya, rata-rata pendapatan satu orang penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan selama setahun sebesar Rp. 26,54 juta. Secara riil, PDRB perkapita tumbuh sebesar 24,05 persen pada periode 2010 – 2015 atau selama 5 tahun.

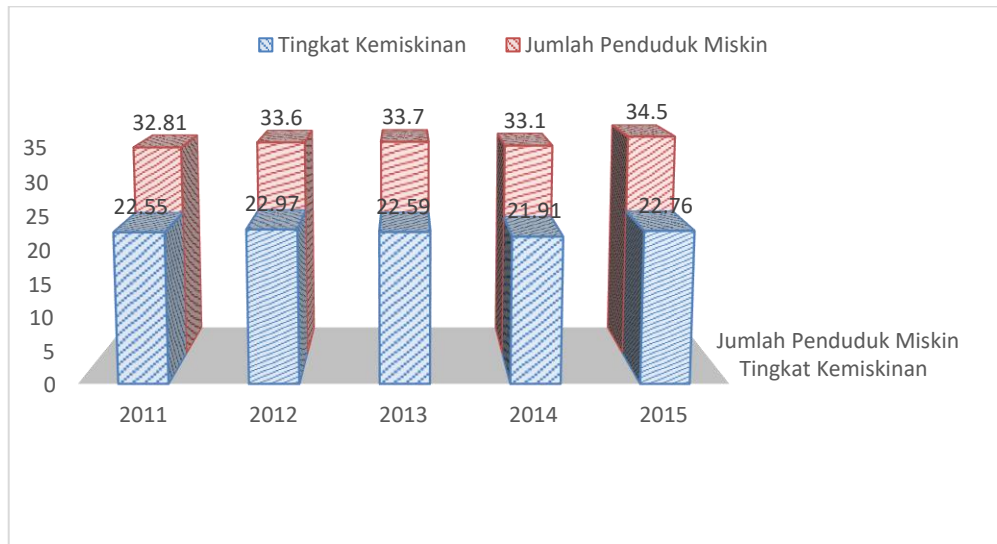
3. Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan menduduki peringkat tertinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 22,76 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 34.500 jiwa. Angka tersebut menunjukkan trend peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yaitu sebesar 21,76 persen.



Kondisi tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.4
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015



Sumber: Pengolahan Data BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

2) Perkiraan Tahun 2018

Kondisi ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2018 diperkirakan mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan PDRB yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perkiraan perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2017 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pada kisaran 5,1 – 6,0% dari tahun 2015 yang sebesar 5,14%. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor-sektor utama penyumbang PDRB masih akan menggeliat seperti sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran serta sektor jasa.
2. Adapun pendapatan perkapita pada tahun 2017 diperkirakan mengalami peningkatan antara Rp. 10.527.015 – 11.447.128 rupiah.
3. Angka kemiskinan pada tahun 2017 diharapkan mengalami penurunan pada kisaran 21,92-21,20 persen.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Pertumbuhan perekonomian daerah merupakan hal yang mutlak harus dicapai dan harus diemban oleh para pemangku kepentingan pembangunan daerah, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Berbagai upaya harus dilakukan untuk menghasilkan solusi menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dan cenderung menghambat pertumbuhan perekonomian daerah. Disamping itu, analisis terhadap kondisi perekonomian secara global juga harus dipertimbangkan terkait lesunya perekonomian di Eropa, karena pasti akan berimbas pada perekonomian secara nasional dan Lebih jauh lagi akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pertumbuhan perekonomian daerah.



a. Tantangan

Tantangan perekonomian daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2017 dan tahun 2018 diantaranya :

- 1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan baik itu sumber daya manusia aparatur (Pegawai Negeri Sipil) maupun masyarakat pada umumnya yang bergerak pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Rendahnya kualitas SDM aparatur mempengaruhi pencapaian optimalisasi dan profesionalitas kinerja birokrasi dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan layanan bagi masyarakat. Sedangkan rendahnya kualitas masyarakat yang bergerak pada sektor-sektor potensial menghambat penciptaan peluang-peluang atau inovasi baru yang menopang peningkatan perekonomian daerah.
- 2) Reformasi Birokrasi dan penciptaan tata kelola birokrasi yang baik belum tercipta secara optimal sehingga upaya menuju *clean governance* dan *good government* masih belum bisa berjalan sehingga berpengaruh pada lambannya peningkatan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.
- 3) Usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang notabene sebagai basis atau pondasi perkuatan perekonomian daerah, belum mendapatkan perhatian dan pengembangan dari Pemerintah Daerah. Selain itu potensi pariwisata dan perdagangan/jasa masih perlu didorong untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang berpotensi dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan.
- 4) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan irigasi) masih kurang maksimal sehingga mempengaruhi aksesibilitas dan mobilitas manusia, barang dan jasa serta lalu lintas hasil produksi daerah baik dari dan keluar daerah tidak optimal.
- 5) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan masih belum maksimal sehingga sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan potensi unggulan Kabupaten Bengkulu Selatan belum berkembang.
- 6) Belum digalinya potensi-potensi daerah yang bisa menjadi sumber PAD bagi Daerah, perlu nya studi banding ke daerah yang sudah maju sehingga Potensi PAD dapat ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- 7) Perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan cara pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 8) Masih belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana mengingat Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah rawan bencana.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang banyak baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan pariwisata yang sampai saat ini belum dikelola dengan maksimal. Untuk itu kedepan Pemerintah Daerah harus mulai memberikan porsi yang lebih besar dalam pengembangan dan pengolahan sektor-sektor yang potensial tersebut.

Prospek perekonomian daerah yang berpotensi untuk dikembangkan pada tahun mendatang antara lain :

- 1) Sektor Pertanian yang terdiri dari tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan yang beberapa tahun terakhir telah menyumbang PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan paling besar dibandingkan sektor lain, ke depan masih



- dapat dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian daerah, dengan program dan kegiatan antara lain pengembangan perikanan, perkebunan dan pengelolaan kehutanan.
- 2) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 2017 diperkirakan masih akan menjadi sektor penyumbang PDRB yang cukup signifikan setelah sektor pertanian. Hal ini karena geliat perdagangan sudah terlihat dengan semakin banyaknya rumah-rumah toko yang dibangun, banyaknya hotel yang berdiri serta usaha restoran yang juga menjamur di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - 3) Potensi pariwisata yang belum dikembangkan secara maksimal, diantaranya Pantai Pasar Bawah, Pantai Bengkenang, Air Terjun Cawang, Air Terjun Geluguran, Goa Suruman dan masih banyak lagi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan seberapa tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta program kerja yang telah direncanakan, terutama yang bersinggungan langsung dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dimaksud dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang seharusnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Selatan beberapa tahun terakhir ini terhadap penerimaan masih relatif kecil dibandingkan dari sumber penerimaan perimbangan.

Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan selama 3 (Tiga) tahun terakhir (Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016) memperlihatkan bahwa terdapat komponen kondisi dimana terjadi pertumbuhan/penurunan proporsi sumber pendapatan, pencapaian target pendapatan, realisasi belanja, proporsi penggunaan anggaran dan pembiayaan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini terjadi karena salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum mampu menggali potensi dan peluang pendapatan secara optimal. Pengelolaan dan penggalan sumber-sumber yang berpotensi mendatangkan pendapatan asli daerah harus dilakukan dengan jalan ekstensifikasi dan intensifikasi, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan lancar dan mampu menjangkau seluruh masyarakat.

Keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan kerangka pendanaannya beberapa tahun terakhir sangat bergantung pada luncluran dana dari Pemerintah Pusat. Pada tahun yang akan datang diperkirakan keuangan daerah masih akan tetap bergantung pada luncluran dana perimbangan dari pusat baik itu melalui mekanisme Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun dana Tugas Pembantuan atau Urusan Bersama.

Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi perimbangan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (equilibrium) di masa yang akan datang, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik.

Berikut ini data realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 s/d 2019.



Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2015 - 2019

NO	Uraian	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017	Proyeksi/ Target Pada Tahun 2018	Proyeksi/ Target Pada Tahun 2019
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	48.885.964.453	51.964.150.882,8	53,286,076,128.44	61,278,987,547.71	70,470,835,679.87
1.1.1	Pajak Daerah	4.639.032.000	5.355.614.999,8	6,107,689,098.39	7,023,842,463.15	8,077,418,832.62
1.1.2	Retribusi Daerah	25,206.213.034	1.985.066.600	31,403,286,076.60	36,113,778,988.09	41,530,845,836.30
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	3.458.616.039	3.428.172.010	3,952,503,666.45	4,545,379,216.42	5,227,186,098.89
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	15.582.103.380	41.195.297.273	11,822,597,287.00	13,595,986,880.05	15,635,384,912.06
1.2	Dana Perimbangan	604.725.507.000	870.789.443.000	802,058,470,683.00	972,367,241,285.45	1,100,722,327,478.27
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	27.458.175.000	16.519.177.000	32,487,493,100.00	37,360,617,065.00	42,964,709,624.75
1.2.2	Dana Alokasi Umum	511.116.682.000	564.137.639.000	648,758,284,850.00	796,072,027,577.50	897,982,831,714.13
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66.150.650.000	290.132.627.000	120,812,692,733.00	138,934,596,642.95	159,774,786,139.39
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	158.302.953.000	142.115.679.770,64	234,210,126,734.35	269,341,645,744.50	309,742,892,606.18
1.3.1	Hibah	-	31.482.112.074,42	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	16.093.500.000	18.604.508.696,22	13,300,190,184.35	15,295,218,712.00	17,589,501,518.80
1.3.4	Bantuan keuangan dari provinsi, pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.5	Dana penyesuaian dan otonomi Daerah	142.209.453.000	92.029.059.000	220,909,936,550.00	254,046,427,032.50	292,153,391,087.38
Jumlah Pendapatan Daerah		811.914.424.453,00	1.064.869.273.653,44	1,089,554,673,545.79	1,302,987,874,577.66	1,480,936,055,764.31

Sumber : Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah Data Tahun 2017

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah dapat dijadikan sebagai panduan atau kerangka dasar dalam mengelola keuangan daerah yang meliputi kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah serta pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah ini penting disusun dengan tujuan agar setiap kebijakan yang nantinya dihasilkan selalu berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
2. Optimalisasi asset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk memberdayakan BUMD yang sudah ada secara optimal.
3. Melakukan reformasi regulasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan optimalisasi pendapatan mempunyai dasar legalitas yang jelas.
4. Melakukan pendataan dan sosialisasi dalam bidang pendapatan daerah sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pendapatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di unit teknis terkait.
6. Pengelolaan dan pengembangan serta pembangunan potensi daerah terutama sumber daya alam yang belum tergalikan dan terkelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.



3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan terus dilakukannya upaya penyempurnaan di bidang pengelolaan keuangan, dimana masyarakat semakin menuntut adanya keuangan publik yang transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Disamping itu pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, mendasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi.

Secara umum gambaran realisasi dan proyeksi/target belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2015 - 2019

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017	Proyeksi/ Target pada tahun 2018	Proyeksi/ Target pada tahun 2019
2.1	Belanja Tidak Langsung	512.967.810.534,31	617.131.046.201,98	704,763,913,194.88	821,428,694,313.74	944,642,998,460.80
2.1.1	Belanja Pegawai	440.222.488.704,31	448.411.962.914,72	514,325,754,244.83	602,424,811,521.18	692,788,533,249.36
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	24.355.939.230	18.791.000.000	18,388,500,000.00	21,146,775,000.00	24,318,791,250.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	260.000.000	368.000.000	230,000,000.00	264,500,000.00	304,175,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	47.529.382.600	14.886.008.3287,26	171,060,658,950.05	196,719,757,792.56	226,227,721,461.44
2.1.8	Belanja tidak terduga	600.000.000	700.000.000	759,000,000.00	872,850,000.00	1,003,777,500.00
2.2	Belanja Langsung	358.773.188.907,69	461.221.358.124	405,499,219,594.00	512.004.148.077	533.242.891.318
2.2.1	Belanja Pegawai	49.015.239.700,00	43.234.872.985	40,500,840,168.00	55,940,345,453.10	60,951,397,271.07
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.278.104.978,00	173.812.997.380	167,770,647,991.00	210,314,201,190.62	218,415,037,409.10
2.2.3	Belanja Modal	172.479.844.229.69	244.173.487.759	197,227,731,435.00	245,749,601,434.25	253,876,456,637.83
	Jumlah	871.740.999.442,00	1.078.352.404.325,98	1,110,263,132,788.88	1,333,433,442,390,74	1,477,910,889,779.80

Sumber : Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Data Tahun 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran belanja aparatur masih mendominasi belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dibandingkan dengan anggaran belanja pelayanan publik. Hal ini terlihat jelas dimana lebih dari 50% dari total belanja daerah diserap



oleh belanja pegawai dalam hal ini membayar gaji. Kondisi ini berimplikasi terhadap anggaran untuk belanja pelayanan masyarakat dalam porsi yang tidak terlalu besar.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi; angsuran hutang, bantuan modal, dan transfer ke dana cadangan.

Berikut ini dapat digambarkan Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2015 s/d 2019

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017	Proyeksi/ Target Pada Tahun 2018	Proyeksi/ Target Pada Tahun 2019
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	64.885.104.486,04	46.965.242.746,96	19,063,571,720.09	36,499,349,813.08	35,318,599,713.15
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	2.000.000.000,00	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) daerah	200.000.000,00	33.482.112.074,42	2.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.200.000.000,00	33.482.112.074,42	2.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00
	PEMBIAYAAN BERSIH	62.685.104.486,04	13.483.130.672,54	17,063,571,720.09	31,499,349,813.08	30,318,599,713.15

Sumber : Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Data Tahun 2017



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan kajian terhadap berbagai aspek seperti kajian terhadap program prioritas Pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan isu-isu strategis yang di daerah yang telah dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode masa kepemimpinan 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS”**.

Kalimat “EMAS” dalam visi tersebut merupakan kata kunci yang menjadi kontrak politik yang harus diwujudkan. Dimensi yang terkandung dalam kalimat “EMAS” adalah Mewujudkan Bengkulu Selatan yang partisipatif, aspiratif dan merata untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera. Elok merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang di bentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal. Maju mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang. Aman adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan masyarakat. Sejahtera merupakan suatu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam rangka pencapaian tujuan akhir dari visi yang telah ditetapkan tersebut, disusun misi, tujuan dan sasaran program pembangunan yang diharapkan nantinya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai visi Pemerintah Daerah.

Berikut ini disajikan misi, tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah di *breakdown* dari visi yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah:



Tabel 4.1
Strategi Dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera)

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5	6
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penerapan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik					
1	Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah	Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini atas laporan keuangan pemerintahan daerah
2	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan dan perluasan penerapan reformasi tata kelola birokrasi	Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi	- Nilai Evaluasi SAKIP - Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP CC - Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Menciptakan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	- Persentase evaluasi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government)	Meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian penerapan reformasi birokrasi	Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat	- Jumlah website (media center) yang dikelola oleh pemerintah daerah
3	Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perluasan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan dan perluasan pelayanan publik	Peningkatan dan perluasan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan standar kualitas pelayanan prima	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkulu Selatan di Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai IKM nya baik
		Meningkatnya kinerja pemerintahan	Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh	Penempatan dan distribusi ASN	- Persentase penempatan ASN



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5	6
		melalui profesionalisme tata kelola dan partisipasi publik	aparatur profesional melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur	sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan	berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai (%) - Persentase SKPD yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)
4	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi aparatur	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan - Eselon II - Eselon III - Eselon IV
		Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja birokrasi	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan daerah	Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Jumlah kasus dan temuan - Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan					
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan minat baca masyarakat	Peningkatan akses layanan pendidikan yang meluas dan merata	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat	- APM PAUD (%) - APM & APS SD (%) - APM & APS SMP (%) - Jumlah Perpustakaan - Jumlah Pengunjung Perpustakaan - Angka Melek Huruf (%)
		Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dan sesuai standar pelayanan	Peningkatan standar pelayanan pendidikan	- Persentase Guru SD & SMP yang bersertifikasi - Persentase SD & SMP yang terakreditasi
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	- AKB/1000 - AKI/1000 - Persentase Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang - Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk
				Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk	- Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jamkes/ BPJS - Jumlah Penduduk Miskin yang



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5	6
				miskin	dilayani Jamkesda
		Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang berkualitas	Peningkatan Kemampuan dan kualitas Pelayanan Kesehatan disemua Lembaga Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas Terakreditasi - Rasio Puskesmas/Pustu/ Poliklinik Per Jumlah Penduduk - Akreditasi RSUD
				Penyediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokter Umum - Jumlah Dokter Spesialis - Jumlah Desa yang belum memiliki bidan desa
		Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja	Mengendalikan angka kelahiran penduduk dan meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja	Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan angka kelahiran bayi - Persentase Peserta KB (%)
				Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
Misi 3 : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas Dan Prioritas Yang Berkeadilan Serta Berwawasan Lingkungan					
1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten untuk mencapai keseimbangan pembangunan	Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten	Membangun, mengembangkan dan memelihara kondisi infrastruktur jalan dan jembatan	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang - Persentase jalan pedesaan dalam kondisi baik/ sedang - Persentase jembatan dalam kondisi baik
2	Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur permukiman	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan	Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rumah tangga berakses air bersih (%) - Persentase rumah tangga bersanitasi (%) - Persentase lingkungan permukiman kumuh (%) - Jumlah Desa yang belum memiliki jaringan listrik - Persentase rumah tangga yang teraliri listrik
3	Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) - Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi (m) - Panjang jalan sentra produksi yang



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5	6
					dibangun (m) - Panjang jalan sentra produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m) - Luas jaringan irigasi usaha tani yang dibangun/ direhabilitasi (Ha) - Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)
4	Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berorientasi pada pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah	- Jumlah dokumen peraturan terkait penataan ruang daerah - Persentase kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana tata ruang - Persentase perencanaan pembangunan yang menerapkan KLHS
				Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan	- Persentase pengelolaan persampahan daerah - Jumlah TPS
		Meningkatnya penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana	Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	Peningkatan Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan simulasi Penanggulangan Bencana	- Jumlah kelurahan/desa yang tangguh bencana
Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Berbasis Pada UMKM, Industri, Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing, Berorientasi Pasar Dan Bernilai Tambah					
1	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis pada keunggulan lokal	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, usaha kecil menengah dan koperasi yang berbasis sumber daya lokal	Penguatan kelembagaan, perluasan permodalan dan pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi	- Jumlah Usaha Kecil menengah dan koperasi yang mendapatkan pembinaan - Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan
				Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk perdagangan	- Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi
				Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya lokal	- Jumlah sentra industri yang dikembangkan - Jumlah kelompok usaha baru



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5	6
					(KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang mendapat pembinaan
2	Menanggulangi angka pengangguran dan kemiskinan	Menurunnya angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja yang luas dan berorientasi pasar	Meningkatkan kualitas dan kompetensi, serta produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	- Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan - Jumlah pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang diadakan
		Menurunnya angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin	Meningkatkan penanganan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	- Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan - Jumlah korban bencana alam, sosial dan keluarga miskin yang dilindungi - Jumlah Pendamping Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3	Meningkatkan daya saing bidang kepariwisataan	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat	Membangun dan mengembangkan objek wisata serta ekonomi kreatif yang berdaya saing	Pembangunan dan pengembangan objek wisata untuk menjadi destinasi wisata	- Jumlah objek wisata yang dikembangkan
				Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata	- Jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan - Jumlah Museum
4	Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	Mengembangkan potensi-potensi investasi daerah dengan dukungan sistem pengelolaan yang profesional	Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang profesional	- Nilai investasi (Rp.) - Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang dilayani - Rata-rata lama pelayanan perizinan

Misi 5 : Mewujudkan Kedaulatan Pangan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Pertanian Ramah Lingkungan

1	Meningkatkan pengembangan sektor pertanian sebagai langkah mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat	Peningkatan Ketersediaan Pangan dengan mengembangkan pola distribusi, pengendalian harga dan kualitas pangan masyarakat	Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan stok pangan daerah	- Jumlah Desa Mandiri Pangan
		Meningkatnya kesejahteraan yang ditandai peningkatan pendapatan dan daya beli petani nelayan	Meningkatkan jumlah produksi dan mutu hasil pertanian, perkebunan dan perikanan budidaya	Perluasan Areal Pertanian Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian	- Luas Areal Sawah yang di cetak - Produksi tanaman pangan dan hortikultura a. Padi b. Jagung c. Kedelai



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> d. Sayuran - Jumlah Desa mandiri benih - Jumlah sentra produksi beras unggulan lokal
				Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi perkebunan unggulan a. Kelapa Sawit b. Karet c. Kopi d. Kakao
				Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi Daging ternak a. Sapi b. Kambing c. Unggas
				Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi perikanan budidaya (ton)
				Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jenis komoditas industri berbasis pertanian yang dikembangkan
				Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah unit pengolahan hasil ternak
Misi 6 : Meningkatkan Peran Pemuda Dan Perempuan Dalam Pembangunan					
1	Meningkatkan daya saing kepemudaan	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas	Meningkatkan kompetensi melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda	Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina - Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha
				Peningkatan pengetahuan pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pemuda
				Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat nasional - Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat provinsi - Peringkat prestasi berskala provinsi



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dan akses peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik	- Jumlah sarana olahraga yang direvitalisasi - Indeks pembangunan gender - Indeks pemberdayaan gender - Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif - Persentase perempuan yang menduduki jabatan publik
		Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	- Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Persentase kasus kekerasan yang diselesaikan - Jumlah anak bermasalah yang dilindungi
Misi 7 : Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Aman, Adil, Dan Harmonis Yang Bertumpu Pada Nilai-Nilai Keagamaan Dan Kearifan Lokal					
1	Meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis	Meningkatnya tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong	Meningkatkan kondisi yang aman, tertib dalam lingkungan masyarakat	Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat	- Operasi penyakit masyarakat - Persentase penegakan perda
2	Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, saling menghargai dan menghormati	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan di tengah kehidupan masyarakat	Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan	- Jumlah tempat ibadah - Jumlah lembaga pendidikan keagamaan
3	Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal	Berkembangnya nilai adat istiadat dan budaya lokal sebagai kekayaan daerah	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian adat istiadat dan budaya lokal	Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam setiap aktivitas kegiatan kemasyarakatan	- Jumlah sekolah yang muatan lokal adat istiadat dan budaya lokal - Jumlah desa yang memiliki perdes tentang adat



4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan daerah adalah program pembangunan yang telah dipilih dan ditetapkan dalam urutan tertinggi skala prioritas diantara banyak program kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah. Program prioritas diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang muncul dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain merupakan Penjabaran RPJMD, Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

a. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu landasan penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018. Pokok-pokok pikiran dimaksud yang harus diperhatikan dari eksekutif guna mengakomodir dalam RKPD 2018, mencakup :

1. Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan masyarakat
3. Bantuan Keuangan

b. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “**Nawa Cita**”, yaitu:



1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh seluruh warga Negara, dengan agenda prioritas :
 - ❖ Politik luar negeri bebas aktif;
 - ❖ Melindungi hak dan keselamatan warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran;
 - ❖ Kedaulatan Maritim
 - ❖ Meningkatkan anggaran pertahanan 1,5% dari GDP dalam 5 tahun ke depan;
 - ❖ Mengembangkan industri pertanian nasional;
 - ❖ Menjamin rasa aman bernegara dengan membangun Polri yang profesional
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan agenda prioritas :
 - ❖ Memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan;
 - ❖ Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
 - ❖ Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas - tugas kepresidenan secara lebih efektif;
 - ❖ Membangun transparansi tata kelola pemerintahan;
 - ❖ Menjalankan reformasi birokrasi
 - ❖ Membuka partisipasi publik.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan, dengan agenda prioritas :
 - ❖ Desentralisasi asimetris
 - ❖ Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan;
 - ❖ Penataan daerah otonom untuk kesejahteraan rakyat;
 - ❖ Implementasi UU Desa
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan agenda prioritas :
 - ❖ Membangun politik legislasi yang kuat : pemberantasan korupsi, penegakan hak, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum;
 - ❖ Memperkuat kovisi pemberantasan korupsi (KPK)
 - ❖ Memberantas Mafia Peradilan;
 - ❖ Pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang;
 - ❖ Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah;
 - ❖ Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal;
 - ❖ Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu
 - ❖ Pembangunan budaya hukum.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dengan agenda prioritas :



- ❖ Program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan;
 - ❖ Program Kartu “Indonesia Sehat” melalui layanan kesehatan masyarakat;
 - ❖ Program “Indonesia Kerja” dan Indonesia Sejahtera” melalui reformasi agrarian 9 juta Ha untuk rakyat tani dan buruh tani, umahsusun bersubsidi dan jaminan sosial
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan agenda prioritas :
- ❖ Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang se kurang-kurangnya 2000 km;
 - ❖ Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama;
 - ❖ Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama
 - ❖ Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industry baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya;
 - ❖ Membangun sekurang-kurangnya 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada;
 - ❖ Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari
 - ❖ Membangun sejumlah science and teknopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan sarana prasarana dengan teknologi terkini
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.
- ❖ Membangun kedaulatan pangan
 - ❖ Mewujudkan kedaulatan energi
 - ❖ Mewujudkan kedaulatan keuangan
 - ❖ Mendirikan bank petani/nelayandan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di setiap sentra produksi tani/nelayan
 - ❖ Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan system inovasi nasional.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
- ❖ Membangun pendidikan kewarganegaraan
 - ❖ Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional
 - ❖ Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil
 - ❖ Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi
 - ❖ Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang IPTEK.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan emperkuat restorasi sosial Indonesia. Memperkuat pendidikan ke-Bhinenka-an dan menciptakan ruang – ruang dialog antar warga
- ❖ Restorasi social untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga
 - ❖ Membangun kembali gotong – royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi social
 - ❖ Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan.



- ❖ Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Untuk tercapainya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD Tahun 2018 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (Sembilan) agenda Nawa Cita Jokowi-JK dalam tahun 2018 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019, dengan skala prioritas sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan social, serta pembentukan mental / karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air serta semangat bela Negara.
2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agrarian, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera.
3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.
4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritime, energy, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.



Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;
4. Indeks Gini sebesar 0,36;
5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 merupakan tahun keempat dari RPJMN Tahun 2015-2019. Dilaksanakan Dalam Rangka **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”** Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi guna mendorong investasi. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial secara luas dan sasaran wilayah dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan. Berikut 10 Prioritas Nasional Tahun 2018 Meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan Permukiman;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
5. Ketahanan Energi;
6. Ketahanan Pangan;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman;
9. Pembangunan wilayah;
10. Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan.

c. Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 ditujukan untuk **“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”** Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tahun 2018 tersebut, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2018, meliputi :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan.
2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-maritim dan Hilirisasi
3. Pengembangan Infrastruktur Strategi dan Industrialisasi
4. Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
5. Visit 2020 Wonderful Bengkulu



d. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 ditujukan untuk : **“Mewujudkan Bengkulu Selatan Emas (Elok Maju Aman Sejahterah) Dengan Memacu Investasi dan Mengedepankan Pembangunan Infrastruktur Dasar Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”** Untuk Mendukung pencapaian tujuan pembangunan tahun 2018 tersebut, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2018 meliputi:

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government)
2. Peningkatan layanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Penyediaan Infrastruktur berkualitas dan prioritas.
4. Revitalisasi Pembangunan Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan
5. Peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, Industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing berorientasi pasar dan bernilai tambah.



Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Program Pembangunan Daerah	OPD
1	2	3	4	5	6	7
1	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini atas laporan keuangan daerah	WTP	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 	Badan pengelolah Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi SAKIP	CC	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 	Sekretariat Daerah
			Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP CC	65	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	Inspektorat Daerah
			Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	CC	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 	
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase penerapan Perbup tentang Tata Kerja Organisasi (Tupoksi) lembaga/perangkat daerah	80	<ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Kelembagaan 	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government)	Jumlah Website yang dikelola Pemerintah daerah	10	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan dan perluasan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di perizinan pelayanan terpadu	82	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Pelayanan Publik 	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai IKM nya baik	6		
		Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan partisipasi publik	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai (%)	60	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
			Persentase SKPD yang	60		



NO	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Program Pembangunan Daerah	OPD
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)		<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 	Inspektorat Daerah
			Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%)			
			Eselon II	40-50		
			Eselon III	40-50		
		Eselon IV	40-50			
		Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	75%	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	
			Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	75%		
Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan	80					
2	Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.	Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan minat baca masyarakat	Angka Partisipasi Murni PAUD (%)	70	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan Anak Usia Dini 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Murni SD (%)	99,4	<ul style="list-style-type: none"> Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 	
			Angka Partisipasi Murni SLTP (%)	87,6		
			Jumlah Perpustakaan	65-70	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Jumlah Pengunjung Perpustakaan	475,000-485,000		
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,90	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 				
		Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase SD yang terakreditasi	70-80	<ul style="list-style-type: none"> Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase SMP yang terakreditasi	70-80		
			Persentase Guru SD yang berijazah minimal S1			



NO	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Program Pembangunan Daerah	OPD
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Guru SMP yang berijazah minimal S1		Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
			Jumlah Sekolah Terakreditasi SD & SMP	3 dan 1	• Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Bayi /1000 penduduk	17-12	• Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kasus Kematian Ibu /1000 penduduk	1-0		
			Jumlah Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang	6-4	• Program Perbaikan Gizi Masyarakat • Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	0,45	• Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
			Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jamkes/BPJS	67%	• Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	
			Persentase Penduduk Miskin yang dilayani Jamkesda	65%		
			Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang berkualitas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	10	
		Rasio Puskesmas/Pustu/Poliklinik Per Jumlah Penduduk		1:1340		
		Peningkatan Tipe RSUD Hasanuddin Damrah		B	• Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	
			Jumlah Dokter Umum	45-48	• Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokter Spesialis	13-16		
		Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja	Jumlah Penurunan Angka kelahiran Bayi	2390	• Program Keluarga Berencana • Program pelayanan kontrasepsi • Program pembinaan peran serta	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Persentase Kepesertaan KB (%)	85					



NO	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Program Pembangunan Daerah	OPD
1	2	3	4	5	6	7
					masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri <ul style="list-style-type: none"> • Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 	Anak
			Persentase pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	65-70	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kesehatan Reproduksi Remaja • Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 	
3	Penyediaan Infrastruktur dasar publik yang berkualitas dan prioritas.	Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	60-70	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan • Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase jalan pedesaan dalam kondisi baik/sedang	60-70	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 	
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	60-70	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan • Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 	
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	70-80	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan dan pengolahan air baku • Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah • Program Lingkungan Sehat 	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Program Pembangunan Daerah	OPD
1	2	3	4	5	6	7
					Perumahan	
			Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	70-80	<ul style="list-style-type: none"> Program Lingkungan Sehat Perumahan 	
			Rasio Elektrifikasi	97.5	<ul style="list-style-type: none"> Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 	
			Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	70-80		
			Kawasan Kampung Nelayan Terpadu	1	<ul style="list-style-type: none"> Program pembangunan perumahan Prog penetapan&strategi kebijakan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang 	
				<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Terpadu Program pengembangan perikanan tangkap 	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	6000	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 	Dinas Pertanian
			Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi (m)	1500	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 	
			Panjang jalan sentra produksi yang dibangun (m)	10,000	<ul style="list-style-type: none"> Program pembangunan jalan dan jembatan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Dinas Pertanian
Panjang jalan sentra produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m)	5000		<ul style="list-style-type: none"> Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				Dinas Pertanian		



NO	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Program Pembangunan Daerah	OPD			
1	2	3	4	5	6	7			
			Luas jaringan irigasi usaha tani yang dibangun/ direhabilitasi (m)	5000	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian			
			Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	70-80	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian			
			4	Pembangunan kualitas Lingkungan hidup dan Mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Jumlah dokumen peraturan terkait penataan ruang daerah	4-5	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Tata Ruang 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana tata ruang	70-80	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 	
			Persentase perencanaan pembangunan yang menerapkan KLHS	70-80	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Pembangunan Daerah 	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
			Persentase pengelolaan persampahan daerah	70-80	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
			Jumlah TPS	40-45	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 				
			Meningkatnya penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana	20-30	<ul style="list-style-type: none"> Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah			
5	Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis pada keunggulan lokal	Jumlah Usaha Kecil menengah yang mendapatkan pembinaan	395	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 	Koperindag dan UM			
			Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan	229-239	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 				
			Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	7-9	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 				
			Jumlah sentra industri yang dikembangkan (Pengolahan	19	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Pengembangan Industri 				



NO 1	Prioritas 2	Sasaran 3	Indikator Sasaran 4	Target 2018 5	Program Pembangunan Daerah 6	OPD 7
			makanan, Pengolahan ikan, Batu bata dll.)		Kecil dan Menengah	
			Jumlah kelompok usaha baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang mendapat pembinaan	18	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 	
			PPI yang dikembangkan	2	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan perikanan tangkap 	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Menurunnya angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja yang luas dan berorientasi pasar	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan	210	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Jumlah pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang diadakan	4	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 	
		Menurunnya angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin	Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan	26.000-27.000	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 	Dinas Sosial
			Jumlah korban bencana alam, sosial dan keluarga miskin yang dilindungi	150	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 	
			Jumlah Pendamping Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	11	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 	
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	3-4	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 	Dinas Pariwisata
			Kawasan Wisata Bahari	1	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 	
			Jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan	24-26	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Museum	1	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 		



NO	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Program Pembangunan Daerah	OPD
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala Nasional	4	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Iklim Investasi dan Program Peningkatan Pelayanan Publik 	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang dilayani	100		
			Rata-rata lama pelayanan perizinan	3		
6	Meningkatkan pengembangan sektor pertanian sebagai langkah mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat	Jumlah Desa Mandiri Pangan	2	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya kesejahteraan yang ditandai peningkatan pendapatan dan daya beli petani nelayan	Luas Areal Sawah yang di cetak	0	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 	Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			a. Padi	90,098-91,098	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 	Dinas Pertanian
			b. Jagung	16,814-17,814		
			c. Kedelai	512.54-522.54		
			d. Sayuran	18,597		
			Jumlah Desa mandiri benih	2	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 	Dinas Ketahanan Pangan
			Penanganan Hasil Beras Unggulan (ETJ) (Paket)	1		
			Produksi perkebunan unggulan			
			a. Kelapa Sawit	191.479.512	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 	Dinas Pertanian
			b. Karet	4.181.43		
			c. Kopi	1.680.027		
			d. Kakao	724.156		
			Produksi Daging ternak		<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan produksi hasil peternakan 	Dinas Pertanian
a. Sapi	182.896					
b. Kerbau	236.105					
c. Kambing	41.899					
d. Unggas	197.438	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan budidaya perikanan 	Dinas Kelautan dan Perikanan			
Produksi perikanan budidaya (ton)	7,547.85					
Jumlah jenis komoditas industri berbasis pertanian yang dikembangkan	5	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 	Dinas Pertanian			



NO	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Program Pembangunan Daerah	OPD
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah unit pengolahan hasil ternak	32	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 	Dinas Pertanian
7	Pemberdayaan pemuda, perempuan dan keluarga sejahtera.	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas	Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina	460	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha	1.98	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 	
			Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pemuda	5	<ul style="list-style-type: none"> Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 	
			Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat nasional	21	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 	
			Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat provinsi	98		
			Peringkat prestasi berskala provinsi	67	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 	
			Jumlah sarana olahraga yang direvitalisasi	1	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 	
		Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks pembangunan gender	73.01	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks pemberdayaan gender	59.236	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 	
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	0	<ul style="list-style-type: none"> Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 	
			Persentase perempuan yang menduduki jabatan publik	282	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan 	



NO	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Program Pembangunan Daerah	OPD
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	73	<ul style="list-style-type: none"> Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase kasus kekerasan yang diselesaikan	100%		
			Jumlah anak bermasalah yang dilindungi	6		
			Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	82,5 %	<ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Administrasi Kependudukan 	
8	Peningkatan ketertiban umum dan keamanan.	Meningkatnya tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong	Operasi penyakit masyarakat	9	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 	Dinas Satpol PP, Pemadam Kebakaran Dan Dinas Badan Kesatuan Bangsa Politik
			Persentase penegakan perda	23	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemeliharaan Kantrantibmas untuk Pencegahan Tindak Kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 	
9	Pembangunan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya	Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, saling menghargai dan menghormati	Safari Ramadhan (Mesjid)	150	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan wawasan kebangsaan 	Sekretariat Daerah
			Jumlah sekolah yang memiliki muatan lokal adat istiadat dan budaya lokal	10	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Berkembangnya nilai adat istiadat dan budaya lokal sebagai kekayaan daerah	Persentase Jumlah desa yang memiliki perdes tentang adat	70-80		



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Program harus memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur hasilnya, Sedangkan kegiatan prioritas merupakan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung program dan kegiatan. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021, dimana telah ditetapkan program prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
3. Penyediaan Infrastruktur dasar publik yang berkualitas dan prioritas.
4. Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
5. Pembangunan kualitas Lingkungan hidup dan Mitigasi bencana.
6. Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata.
7. Pemberdayaan pemuda, perempuan dan keluarga sejahtera.
8. Peningkatan ketertiban umum dan keamanan.
9. Pembangunan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan akselerasi atau percepatan pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana disebutkan diatas, diperlukan alokasi pendanaan yang sesuai dengan memperhatikan skala prioritas agar pembangunan yang dilakukan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Rekapitulasi kebutuhan pendanaan per OPD sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini dan rencana program dan prioritas kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dituangkan dalam bentuk matriks sebagai berikut:



Tabel 5.1
Rencana Prioritas Pembangunan, Program dan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Program	Program Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
1	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	69	13.297.009.810
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	297	6.554.806.009
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9	1.462.280.000
		Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan partisipasi publik	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	55	4.137.937.735
		Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	62	4.211.367.550
		Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja birokrasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	55	3.553.337.400
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan akses layanan pendidikan yang meluas dan merata	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6	1.778.541.500
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16	7.703.451.631
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	9	616.000.000
			Program Pendidikan Non Formal	3	150.000.000
		Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	325.000.000
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	13	12.752.982.897
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2	354.752.940
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3	294.432.600
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21		51.055.899.465		



NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Program	Program Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2	385.157.300
		Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang berkualitas	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	11	39.335.409.450
		Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja	Program Keluarga Berencana	5	1.441.280.000
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	5	988.060.000
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	6	160.000.000
			Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	5	245.000.000
3	Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan	Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	45.007.999.200
			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4	922.000.000
			Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	2	125.000.000
			Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	7	2.817.000.000
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat	Program penyediaan dan pengolahan air baku	2	900.000.000
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	7	2.396.000.000
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	4	1.650.000.000
			Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1	251.225.000
			Program pengembangan perumahan	13	8.236.200.000
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah	Program pengembangan perikanan tangkap	6	287.400.000
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	2	2.650.000.000
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan irigasi lainnya	13	19.470.000.000
		Meningkatnya kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Program Perencanaan Tata Ruang	6	846.900.000
Program Pemanfaatan Ruang	8		954.000.000		
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2		170.000.000		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	38		3.356.985.000		



NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Program	Program Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2	6.340.000.000
		Meningkatnya penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	12	636.450.000
4	Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis pada keunggulan lokal	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	5	185.400.000
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	9	352.000.000
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	20	781.478.500
			Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	5	275.000.000
		Menurunnya angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja yang luas dan berorientasi pasar	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4	291.550.000
		Menurunnya angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	8	404.500.000
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	22	1.353.000.000
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8	752.500.000
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6	1.430.000.000
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3	388.300.000
		Meningkatnya investasi daerah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	8	800.000.000
5	Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan	Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	36	3.779.230.000
		Meningkatnya kesejahteraan yang ditandai peningkatan pendapatan dan daya beli petani nelayan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	4	7.863.527.250
			Program peningkatan produksi hasil peternakan	2	795.750.000
			Program pengembangan budidaya perikanan	23	2.086.900.000
6	Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas	Program peningkatan peran serta kepemudaan	23	1.445.984.500
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	3	270.000.000
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	2	220.000.000
			Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	1	220.000.000
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	7	564.868.500



NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Program	Program Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	8	1.100.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	8	880.000.000
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	7	805.000.000
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	5	310.000.000
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	5	241.981.900
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	34	2.297.341.060
7	Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal	Meningkatnya tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	6	176.417.500
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas untuk Pencegahan Tindak Kriminal	15	1.933.831.500
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4	639.606.000
		Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, saling menghargai dan menghormati	Program pengembangan wawasan kebangsaan	20	2.108.737.300
		Berkembangnya nilai adat istiadat dan budaya lokal sebagai kekayaan daerah	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	310.000.000
Total Indikatif Pendanaan Program Prioritas				1.105	282.882.769.497



Tabel 5.2
Kebutuhan Pendanaan Indikatif Berdasarkan OPD

NO	OPD	PAGU ANGGARAN	
		PAGU INDIKATIF TAHUN 2018	PRAKIRAN MAJU 2019
I.	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
	Pendidikan		
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	27.610.287.000	30.371.315.700
	Kesehatan		
2	Dinas Kesehatan	35.552.014.000	39.107.215.400
	UPTD RSUD Hasanudin Damrah	80.955.512.350	83.101.428.475
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	98.771.592.200	109.138.136.040
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	24.431.723.200	22.400.435.520
	Ketentraman Dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat		
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6.971.040.700	7.158.913.770
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	2.984.362.000	3.208.862.000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.082.185.060	3.608.319.974
	Sosial		
8	Dinas Sosial	4.955.203.000	5.450.223.300
II.	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.455.134.800	3.771.047.920
	Pengendalian, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.260.086.200	3.777.121.920
	Pangan		
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.378.475.000	3.362.665.000
	Lingkungan Hidup		
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	14.447.863.600	15.837.981.260
	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil		
13	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	4.740.400.000	2.994.400.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.766.117.000	5.242.728.700
	Perhubungan		
15	Dinas Perhubungan	6.898.907.880	3.932.798.960
	Komunikasi Dan informatika		
16	Dinas Komunikasi Dan informatika	6.113.671.000	5.592.931.000
	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	5.832.654.700	5.910.895.500
	Penanaman Modal		



NO	OPD	PAGU ANGGARAN	
		PAGU INDIKATIF TAHUN 2018	PRAKIRAN MAJU 2019
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.153.804.500	3.126.000.500
	Kepemudaan Dan Olah Raga		
19	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	5.686.615.600	6.255.277.160
	Perpustakaan Dan Kearsipan		
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.897.740.450	1.953.360.000
III.	Urusan Pilihan		
	Perikanan		
21	Dinas Perikanan	4.820.203.000	5.010.713.760
	Pariwisata		
22	Dinas Pariwisata	7.561.374.900	7.607.381.430
	Pertanian		
23	Dinas Pertanian	18.257.114.750	18.679.470.350
IV.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
	Pengawasan		
24	Inspektorat	3.557.504.715	3.752.266.937
	Perencanaan ,Penelitian Pengembangan		
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	11.360.016.000	13.151.860.850
	Keuangan		
26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	16.975.773.218	17.052.770.611
	Kepegawaian Dan Pendidikan Serta Pelatihan		
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.777.560.700	5.204.354.290
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Dan Perangkat Daerah		
28	Sekretariat DPRD	32.481.998.530	37.354.298.310
29	Sekretariat Daerah	48.698.496.354	52.417.510.062
	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	23.376.715.154	24.581.142.662
	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Setda)	1.918.760.000	1.816.760.000
	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam (Setda)	1.655.000.000	2.060.000.000
	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana (Setda)	2.078.000.000	2.511.420.000
	Bagian Administrasi Pembangunan (Setda)	2.077.000.000	2.229.700.000
	Bagian Hukum (Setda)	3.088.560.000	3.106.272.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda)	2.853.599.200	3.635.446.300
	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	4.583.582.000	4.812.761.100
	Bagian Humas, Protokol Dan Santel Sekretariat Daerah	7.067.280.000	7.664.008.000
30	Ulu Manna	690.680.170	762.594.651
31	Air Nipis	908.913.400	700.570.000
32	Kedurang	868.949.200	655.063.600



NO	OPD	PAGU ANGGARAN	
		PAGU INDIKATIF TAHUN 2018	PRAKIRAN MAJU 2019
33	Kedurang Ilir	872.710.000	969.022.000
34	Pino Raya	720.959.500	770.538.350
35	Pino	758.466.000	754.311.000
36	Bunga Mas	1.147.098.000	928.000.000
37	Kota Manna	560.119.200	614.630.720
38	Pasar Manna	1.059.205.000	617.930.500
39	Manna	514.937.200	429.200.000
40	Seginim	466.678.000	513.345.800
Total/Tahun		512.004.148.077	533.242S.891.318

Rencana program dan kegiatan prioritas beserta deskripsinya tersebut akan dipaparkan secara terperinci pada matriks tersendiri yang akan disajikan pada Buku II. Rencana program dan kegiatan prioritas tersebut akan disajikan berdasarkan masing-masing OPD.



BAB VI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Tujuan akhir otonomi daerah ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator Kinerja Kunci pada aspek kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah pertumbuhan PDRB/pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, inflasi, angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka, angka melek huruf dan angka usia harapan hidup. Pada aspek pelayanan umum, IKK nya diantaranya angka partisipasi sekolah (APS), rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk dan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Indikator Kinerja Kunci pada aspek daya saing daerah diantaranya angka konsumsi rumah tangga perkapita dan rasio kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada waktu tertentu. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk.

Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.



Angka konsumsi RT perkapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

Berikuta adalah capaian dan target indikator kinerja daerah Pada Tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan, secara rinci sebagaimana ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut:



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Indikator	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	4,02	4,34	4,71	5,07	6,15
2	Laju Inflasi Kabupaten (%)	3,25	6,6	6,5	6,5	6,3
3	PDRB per kapita (Juta Rupiah)	26,4	28,4	30,6	32,8	39,4
4	IPM	68,8	69,4	70	70,6	71,8
	Pendidikan					
A.2	Kesejahteraan Sosial Pendidikan					
5	Angka Melek Huruf (%)	96.9	96.9-97.9	97.9-98.9	98.9-99.9	100
6	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8.75	8.95	9.12	9.29	9.62
7	Angka partisipasi murni	90.45	91.35	91.45	91.54	91.72
	SD	98,4	98,6	99,3	99,4	100
	SLTP	80,2	82,3	84,2	87,6	100
8	Angka partisipasi kasar	99.12	99.22	99.32	99.42	99.62
	SD	100	100	100	100	100
	SLTP	87,3	88,3	88,7	89,2	90.00
9	Angka pendidikan yang ditamatkan (tahun)	13,22	13,60	14,10	14,60	15,60
	Jumlah Sekolah Terakreditasi					
	SD	113	0	3	3	124
	SMP	31	0	1	1	35
	Kesehatan					
10	Angka kelangsungan hidup bayi	986	988	989	990	992
11	Angka usia harapan hidup (tahun)	67,06	67,06	67,06	67,06	70.00
12	Persentase balita gizi buruk (%)	0,08	0	0	0	0
	Kemisikinan					
	Angka Kemiskinan (%)	21.91	20.81	19.77	18.79	16.95
14	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	79.00	80.23	81,60	82.70	84.90
	Kepemilikan Lahan					



No	Indikator	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2021
1	2	3	4	5	6	7
15	Persentase penduduk yang tidak memiliki lahan	-	-	-	-	-
	Kesempatan Kerja					
16	Rasio Penduduk yang bekerja	61,219	67,341	74,075	81,482	98,594
17	Pengangguran terbuka (%)	2.43	3.30	3.30	3.30	3.30
	Kriminalitas					
18	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	80	85	90	96	100
A.3	Seni Budaya dan Olahraga					
19	Jumlah Grup Kesenian	6	7	8	8	10
20	Jumlah Gedung kesenian	0	0	1	1	2
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B.1	Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					
	Pendidikan Dasar					
21	Angka partisipasi sekolah	99.73	99.74	99.75	99.76	99.78
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	70.20	71.30	71.50	71.70	72.10
23	Rasio Guru murid	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08
	Kesehatan					
24	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 70	1 : 71	1 : 69	1 : 65	1 : 55
25	Rasio puskesmas, poliklinik pusat persatuan penduduk	1 : 1359	1 : 1359	1 : 1355	1 : 1350	1 : 1330
26	Rasio dokter persatuan penduduk	0,031	0,034	0,037	0,039	0,046
27	Rasio tenaga medis persatuan penduduk					
	- Bidan	0.201	0.206	0.211	0.216	0.226
	- Perawat	0.272	0.277	0.282	0.287	0.297
28	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	0	2	6	10	14
	Sarana dan Prasarana Umum					
29	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Jalan Kabupaten)	0	0	50-60	60-70	80-90
30	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0.230613123	0.233687965	0.236762807	0.239837648	0.245987332
	Perhubungan					
31	Jumlah Pelabuhan terminal bis	1	1	1	1	1



No	Indikator	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2021
1	2	3	4	5	6	7
B.2	Pelayanan Penunjang					
	Penanaman Modal					
32	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal dalam negeri	72	72	74	76	80
33	Jumlah nilai investasi berskala Nasional	2	2	3	4	5
	KUKM					
34	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	13	13-14	14-15	15-16	17-18
35	Jumlah Koperasi Non KUD	202	202 - 204	204 - 206	206 - 208	210 - 212
36	Jumlah UMKM non BPR/LKMU KM	1234	1234 - 1239	1239 - 1243	1243 - 1246	1249 - 1255
37	Jumlah BPR	0	0	0	1	3
	Ketenagaan Kerja					
38	Angka partisipasi angkatan kerja	71.01	71-75	75-80	80-85	90-95
	KB dan KS					
39	Jumlah Pasangan Usia Subur	31900	32439	32967	33495	34551
40	Jumlah Peserta KB	25,534-25,791	25,791-26,048	26,048-26,315	26,315-26,572	26,829-27,086
	Pertanahan					
41	Persentase Luas lahan bersertifikat	40	40-45	45-50	50-55	60-65
	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
42	Jumlah LSM	-	-	-	-	-
	Perpustakaan					
43	Jumlah Perpustakaan	226	229	232	235	241
44	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	1833	1833-2016	2017-2217	2218-2439	2684-2952
	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					
45	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4/10.000	4/10.000	9/10.000	14/10.000	30/10.000
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
C.1	Kemampuan ekonomi Daerah					
46	Angka konsumsi RT per kapita	61.73-64.81	64.81-68.05	68.05-71.46	71.46-75.03	78.78-82.72
47	Persentase konsumsi RT untuk non pangan	38.27-40.18	40.18-42.19	42.19-44.3	44.3-46.51	48.84-51.28
48	Produktifitas 9 sektor PRDB	4.5-4.7	4.7-4.9	4.9-5.2	5.2-5.4	5.7-6
49	Pertanian	361,411-379,481	379,481-398,455	398,455-418,378	418,378-439,297	461,262-484,325
50	Pertambangan dan penggalian	3,168-3,326	3,326-3,492	3,492-3,667	3,667-3,850	4,043-4,245



No	Indikator	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2021
1	2	3	4	5	6	7
51	industri pengolahan	15,245-16,007	16,007-16,807	16,807-17,647	17,647-18,530	19,456-20,429
52	Listrik	1,957-2,054	2,054-2,157	2,157-2,265	2,265-2,378	2,497-2,622
53	Bangunan	46,972-49,320	49,320-51,786	51,786-54,375	54,375-57,094	59,949-62,946
54	Perdagangan	264,932-278,178	278,178-292,087	292,087-306,691	306,691-322,026	338,127-355,034
55	Pengangkutan dan komunikasi	87,896-92,290	92,290-96,905	96,905-101,750	101,750-106,838	112,180-117,789
56	Keuangan	49,537-52,013	52,013-54,614	54,614-57,345	57,345-60,212	63,223-66,384
57	Jasa-jasa	244,385-256,604	256,604-269,434	269,434-282,906	282,906-297,051	311,904-327,499
C.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
	Aksesibilitas Daerah					
58	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-	-	-
59	Panjang Jalan	741,95-764,20	764,20-840,62	840,62-924,69	924,69-1.017,16	1.118,87-1.230,76
	Fasilitas Bank					
60	Jumlah Bank	15-16	15-17	15-18	15-19	15-21
	Fasilitas Listrik					
61	Jumlah RT yang menggunakan listrik	20.960-22.008	22.008-23.108	23.108-24.263	24.263-25.477	26.750-28.088
	Ketersediaan Penginapan					
62	Jumlah Penginapan/Hotel	16	17	18	19	21
	Iklim Berinvestasi					
63	Angka kriminalitas	284	255-230	229-207	206-185	166-150
64	Jumlah Peristiwa Kejahatan Yang Diselesaikan	145-152	152-159	159-167	167-176	185-194
65	Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas	29-26	26-23	23-21	21-19	17-15
66	Sumber Daya Manusia					
67	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	208-228	228-251	251-276	276-304	334-368
68	Rasio Ketergantungan	-	-	-	-	-



BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 disusun dengan memperhatikan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2013. RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018.

RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 disusun dengan mekanisme sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang dimulai dari kegiatan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. Secara substantif, RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 menguraikan tentang :

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, plafon dana OPD yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Daftar prioritas kegiatan yang telah dipilah dan dipilih menurut sumber pendanaan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan yang akan diusulkan ke APBD Provinsi dan APBN;
3. Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Sinergi, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran dan prioritas program pembangunan nasional dan daerah terutama yang dananya berasal dari dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan/atau antar pemerintahan daerah seperti bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten Bengkulu Selatan dan bantuan keuangan Kabupaten Bengkulu Selatan kepada pemerintahan desa.

Dengan dokumen RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam hal ini pelaksana pembangunan daerah untuk mempedomani dan melaksanakannya sehingga misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal yang akhirnya visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terealisasi dengan baik.

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. DIRWAN MAHMUD